



MODUL PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Daftar isi

Kata Pengantar

Pendahuluan

BAB 1. Undang Undang Desa

Modul 1.1. Urgensi Undang-undang Desa

Modul 1.2. Hak Dan Kewajiban Masyarakat Desa

Modul 1.3. Pembangunan Desa

Modul 1.4. ABPDesa Dalam Perspektif Desa

Modul 1.5. Penyusunan RPJMDesa

Modul 1.6. Musyawarah Dusun

Modul 1.8: Penggalan Masalah Dan Potensi Melalui Kalender Musim

Modul 1.9. Penggalan Potensi Dan Masalah Dengan Diagram Kelembagaan

BAB 2. Modul Pemberdayaan Disabilitas/Difabel

Modul 2.1. Disabilitas Bagian Dari Keragaman

Modul 2.2. Bergerak Bersama Disabilitas

Modul 2.3 Disabilitas Sebagai Isu Multisektor

Modul 2.4 Kunci Hak Atas Penyandang Disabilita

Modul 2.5. Disabilitas Bukan Hambatan

BAB 3 MODUL PENDIDIKAN POLITIK KRITIS

Modul 3.1. Pengertian Politik

Modul 3.2 Hak Dasar Warga Negara, Serta HAK Masyarakat Desa Sesuai dengan UU Desa no. 6 Tahun 2014 Pasal 68

Modul 3.3 Kewajiban Sebagai Warga Negara dn Kewajiban Masyarakat Desa sesuai dengan UU Desa no. 6 Tahun 2014 Pasal 68

Modul 3.4 Pengertian Demokrasi dan Pemilihan Umum

Modul 3.5 Asas Dalam Pemilu dan Hal Yang Perlu Diketahui Sebelum Menentukan Pemilihan

Modul 3.6. Pengertian Partisipasi Politik

Modul 3.7 Pengertian Politik Uang dan Penyebab Terjadinya Politik Uang

Modul 3.8. Pendidikan Kepemimpinan

BAB 4 Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan

Modul 4.1. Gender

Modul 4.2. Ketidakadilan Gender

Modul 4.3. Gender dalam Budaya Patriarki

Modul 4.4. Diskriminasi Perempuan Karo

Modul 4.5. Kekerasan Terhadap Perempuan

Modul 4.6. Kepemimpinan Perempuan

Modul 4.7. Kepemimpinan Perempuan Karo

BAB 5 Pendidikan Kesadaran HIV-AIDS Dan Narkoba

Modul 5.1. HIV DAN AIDS

Modul 5.2. Stigma Dan Diskriminasi

Modul 5.3. Bahaya Narkoba

Modul 5.4 Gejala HIV&AIDS, Penularan, Pencegahan Dan Penanganannya

BAB 6 Metode dan Strategi Advokasi

Modul 6.1. Advokasi

Modul 6.2. Strategi Advokasi Dalam Politik

KATA PENGHANTAR

Dengan memanjatkan puji dan Syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengucapkan selamat dan sukses secara khusus kepada koodinator dan seluruh staf di Divisi Sosial Politik atas diterbitkannya modul yang berjudul “*Modul Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*” ini sebagai persembahan karya nyata dan kerja koordinator dan seluruh tim Divisi Sosial Politik yang sekaligus sebagai tim penulis dalam buku panduan ini. Semangat dan dedikasi kawan-kawan tim Divisi Sosial Politik menulis buku ini sebagai cermin kekayaan pelayanan dan pengalaman masing-masing pada bidangnya. Pelayanan dan pengalaman dalam setiap pendampingan yang dilakukan dilapangan bagi kami di Yayasan Ate Keleng merupakan cerminan penghargaan terhadap perjalanan hidup yang bermakna dan berdampak. Bermakna dan berdampak kepada seluruh dampingan YAK GBKP dan masyarakat di luar dampingan YAK GBKP. Substansi dari Modul Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat ini adalah dimulai dengan modul pendidikan undang-undang desa dalam Upaya kesejahteraan desa, modul pemberdayaan kaum Difabel sebagai bagian penting memperjuangkan hak mereka adalah sama dengan warga desa lainnya dalam berbagai fasilitas umum di desa, lalu ada modul pendidikan politik kritis yaitu pemberdayaan kepada masyarakat desa untuk memahami politik dan tujuan politik kritis yang menggiring masyarakat untuk merdeka dan bebas dalam menentukan hal politiknya sebagai warga negara, selanjutnya ada modul pendidikan dan pemberdayaan Perempuan dalam hal pemahaman tentang kesetaraan gender di masyarakat, lalu ada modul pendidikan kesadaran HIV-AIDS dan Narkoba serta modul yang terakhir adalah tentang advokasi serta penjelasan tentang metode dan strategi yang digunakan dalam melakukan advokasi tersebut.

Dalam rangka melakukan pendidikan dan pemberdayaan kepada masyarakat dampingan YAK GBKP adalah aktor utama sebagai pelaku dalam pelaksanaannya dilapangan dengan dampingan pemberdayaan dari seluruh staf dan tim di Divisi Sosial Politik adalah tidak lain masyarakat atau warga desa itu sendiri. Tentu saja penting sekali bagi semua warga desa dampingan YAK GBKP untuk mau belajar kritis atas haknya sebagai warga dan konsisten dalam setiap kegiatan pendidikan dan pemberdayaan yang dilakukan di desa. Kami dari Yayasan Ate Keleng/Parpem GBKP berharap besar melalui tulisan Modul Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat yang diterbitkan ini mampu menjadi referensi yang sangat berharga bagi seluruh warga desa dampingan YAK untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian layak kiranya tulisan Modul Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat ini menjadi acuan warga untuk memperlengkapi diri dengan pemahaman dan pengetahuan untuk mewujudkan masyarakat berdaulat dan masyarakat yang merdeka dalam hak-hak hidupnya sebagai warga Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Salam Pemberdayaan.

Sukamakmur, 03 April 2024

Yayasan Ate Keleng/Parpem



Pdt. Yusni Rut Mentina Br Pandia, S.Si, Theol., MADM

(Direktur Eksekutif YAK/Parpem GBKP)

Modul Pendidikan Pemberdayaan Masyarakat

A. Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat, merupakan hal yang penting terus dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan. Berbagai upaya atau metode pun dilakukan agar masyarakat tercerahkan akan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi warga yang berdomisili di perdesaan. YAK (Yayasan Ate Keleng) GBKP mencoba melihat lebih luas, sebuah pemberdayaan tidak melulu berbicara pada dimensi ekonomi, tapi juga sosial dan politik. Pendekatan yang dilakukan pun berbeda, kelompok *marjinal*/terpinggirkan seperti perempuan, korban bencana, Odha dan Kaum Difabel dituntut berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan dari hulu sampai hilir. Tujuannya adalah mereduksi/mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bantuan-bantuan program pemberdayaan masyarakat. Maka, kesejahteraan yang dicapai seharusnya berkelanjutan.

Modul Pendidikan Pemberdayaan Masyarakat ini bertujuan untuk menyusun materi pendidikan kepada kelompok masyarakat atau Organisasi Rakyat (OR) dampingan YAK. Dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat perdesaan secara umum dan masyarakat terpinggirkan seperti perempuan, korban bencana, Odha dan kaum Difabel yang rata-rata adalah keluarga petani. Fokus pembelajaran diarahkan kepada meningkatnya pemahaman dan kekritisitas masyarakat dampingan yang terpinggirkan menggunakan hak sosial politik mereka..

Metode yang digunakan dalam materi diharapkan akan dapat mendorong peran aktif semua peserta pendidikan. Setiap pembahasan yang disampaikan pun disertai dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan untuk dapat didiskusikan bersama dalam kelompok kecil maupun kelompok besar.

Secara garis besar Kategori materi yang dibuat melingkupi:

1. Pendidikan pemahaman tentang UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Pendidikan pemahaman tentang Difabel sesuai dengan UU no 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Pendidikan kesadaran politik kritis.
4. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
5. Pendidikan kesadaran HIV-Aids dan Narkoba.
6. Pendidikan Advokasi

Kategori tersebut dibagi menjadi bagian-bagian materi pendidikan yang sederhana.

Penyempurnaan maupun perubahan modul di masa mendatang senantiasa terbuka dan memungkinkan sesuai dengan perkembangan situasi, kebijakan dan peraturan yang terus terjadi. Harapan kami agar modul ini dapat bermanfaat.

Parapat, 30 Juni 2021

Tim penyusun:

1. Lesmawati br Petanginangin
2. Rupina br Purba
3. Rima Hosianna br Ginting
4. Eninta br Barus
5. Indah br Tarigan

BAB 1. Modul Undang Undang Desa

Modul 1.1. Urgensi Undang-undang Desa

Tujuan:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang tata kelola pemerintahan desa
- 2) Masyarakat melakukan monitoring Dana Desa sesuai UU Desa No. 6/2014 beserta regulasi lainnya

Alat dan bahan :

- 1) Bahan Diskusi : Urgensi Undang-undang Desa
- 2) Lembar respon peserta
- 3) Daftar hadir peserta
- 4) Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
1.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	3 Menit
2.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
3.	Mengawali Pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta : Apa yang ada di pikiran masyarakat ketika mendengar istilah Undang-undang Desa	5 Menit
4.	Memberikan lembar materi dan atau memutar film tentang Urgensi UU Desa kepada kelompok atau peserta	18 Menit
5.	Diskusi masyarakat : 3 poin pertanyaan	15 Menit
6.	Persentasi kelompok	10 Menit
7.	Penutup : 1) Menyampaikan rangkuman atas presentasi kelompok atau peserta 2) Minta peserta mengisi lembar respon 3) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta	6 Menit
	Total	60 Menit

Diskusi

Urgensi Undang-undang Desa Dalam Upaya Kesejahteraan Desa

Pelajari

Pengertian Desa

1. **Desa** adalah **desa** dan **desa adat** atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyebutan desa dan desa adat dapat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat

Kedudukan Desa

Dalam UU 32/ 2004, Desa berada di dalam dan di bawah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Penjelasan tambahan: 'Otonomi desa' adalah bagian dari 'otonomi daerah' yang diserahkan ke desa. Sedangkan dalam UU Desa No. 6/2014 dalam Pasal 5 mengatakan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Artinya desa memiliki wewenang dan kebebasan untuk mengelola hidupnya sendiri sesuai kebutuhan masyarakatnya.

Tantangan Desa

1. Kewenangan : Semakin besar dan luas. Kemampuan menggali hak asal usul dan adat istiadat yang dapat membangun kembali modal sosial desa; Keberanian menerima dan menolak penugasan dari atas (desa bukan pelayan atasan)
2. Tata Kelola : Peningkatan kapasitas dan profesionalisme penyelenggara pemerintahan desa; Mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan publik; Akuntabilitas pertanggungjawaban publik
3. Pembangunan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta **penanggulangan kemiskinan**; Penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; Mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan **pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial**
4. Perencanaan : Memperkuat kualitas partisipasi; Kualitas dokumen RPJMDesa & RKPDesa pro poor, pro gender, pro lingkungan, pro anak; Optimalisasi potensi & sumber daya; Memperkuat data base desa

5. Keuangan Dan Asset : Perencanaan anggaran (APBDesa) konsisten dengan RKPDesa; Kualitas penatausahaan; Peningkatan akuntabilitas; Optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan aset
6. Partisipasi Masyarakat : Terbangunnya mekanisme partisipasi terutama kelompok marjinal; Menumbuhkan semangat keswadayaan dan gotong royong; Membangkitkan forum-forum desa yang telah menjadi khazanah desa; Kemudahan akses informasi; Membangkitkan semangat ekonomi lokal desa
7. Peran Supra Desa : Sosialisasi lebih kontekstual; Pembinaan, pengendalian dan pengawasan partisipatif; Penyiapan regulasi yang memproteksi desa (bukan sekedar mengatur & politisasi); Memfasilitasi kesiapan desa

INGAT :

1. Anggota OR memahami pengertian desa
2. Anggota OR memahami kedudukan desa
3. Anggota OR menjadikan tantangan desa menjadi peluang untuk kesejahteraan desa

SOAL DISKUSI :

1. Apakah anggota OR sudah memahami pengertian desa?
2. Apakah anggota OR memahami kedudukan desa dalam proses perencanaan?
3. Apakah anggota OR sudah pernah terlibat dalam perencanaan kegiatan di desa?

Modul 1.2: Hak Dan Kewajiban Masyarakat Desa

Tujuan:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang tata kelola pemerintahan desa
- 2) Masyarakat melakukan monitoring Dana Desa sesuai UU Desa No. 6/2014 beserta regulasi lainnya

Alat dan bahan :

- 1) Bahan Diskusi : Hak Dan Kewajiban Masyarakat Desa
- 2) Lembar respon peserta
- 3) Daftar hadir peserta
- 4) Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
1.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	3 Menit
2.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
3.	Mengawali Pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta : Apa yang ada di pikiran masyarakat ketika mendengar istilah Hak Dan Kewajiban Warga Negara	5 Menit
4.	Memberikan lembar materi dan atau memutar film tentang Hak Dan Kewajiban Warga Negara kepada kelompok atau peserta	18 Menit
5.	Diskusi masyarakat : 3 poin pertanyaan	15 Menit
6.	Persentasi kelompok	10 Menit
	Penutup : 1) Menyampaikan rangkuman atas presentasi kelompok atau peserta 2) Minta peserta mengisi lembar respon 3) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta	6 Menit
	Total	60 Menit

Diskusi

Hak Dan Kewajiban Masyarakat Desa

Pelajari

Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat desa memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan di wilayahnya sendiri, sehingga diharapkan

pengaturan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk bersifat aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Pengaturan ini membangun kesetaraan dalam memperoleh pelayanan dan hak politik.

Hak Masyarakat Desa (Pasal 68)

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
4. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - a. Kepala Desa
 - b. Perangkat Desa
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - d. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
5. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

Kewajiban Masyarakat Desa (Pasal 68)

1. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
2. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
3. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
4. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
5. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa

Untuk mewadahi peran aktif masyarakat dalam pembangunan, warga desa dapat menyalurkannya melalui:

1. Keterlibatan aktif di Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Adat Desa dengan penjelasan sebagai berikut: Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

INGAT :

1. Anggota OR mengetahui hak dan kewajibannya sebagai masyarakat desa
2. Anggota OR aktif dalam praktek bentuk-bentuk hak dan kewajiban sebagai masyarakat di desa

SOAL DISKUSI :

4. Apakah anggota mengetahui hak dan kewajiban sebagai masyarakat desa?
5. Apakah anggota OR sudah memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sebagai masyarakat desa selama ini?

Modul 1.3. Pembangunan Desa**Tujuan:**

- 1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang tata kelola pemerintahan desa
- 2) Masyarakat melakukan monitoring Dana Desa sesuai UU Desa No. 6/2014 beserta regulasi lainnya

Alat dan bahan :

- 1) Bahan Diskusi : Pembangunan Desa
- 2) Lembar respon peserta
- 3) Daftar hadir peserta
- 4) Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
1.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	3 Menit
2.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
3.	Mengawali Pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta : Apa yang ada di pikiran masyarakat ketika mendengar istilah Pembangunan Desa	5 Menit
4.	Memberikan lembar materi dan atau memutar film tentang Pembangunan Desa kepada kelompok atau peserta	18 Menit
5.	Diskusi masyarakat : 3 poin pertanyaan	15 Menit
6.	Persentasi kelompok	10 Menit
	Penutup : 1) Menyampaikan rangkuman atas presentasi kelompok atau peserta 2) Minta peserta mengisi lembar respon	6 Menit

	3) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta	
	Total	60 Menit

Diskusi

Pembangunan Desa

Pelajari

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar
2. Pembangunan sarana dan prasarana Desa
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pasal 79 (Mengatur Produk Perencanaan)

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, mencakup: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, Rencana Pembangunan Tahunan Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
2. RPJM-Desa dan Rencana Tahunan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa
3. Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa → (*one village, one plan, one budget*)
4. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau diintegrasikan pelaksanaannya kepada Desa
5. Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota

Prosedur Perencanaan dalam Pasal 80

1. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
2. Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
3. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

4. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pasal 81)

1. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
3. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa → Swakelola
4. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Pemantauan Dan Pengawasan Pembangunan Desa (Pasal 82)

1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan –termasuk APBDesa- kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

INGAT :

1. Anggota OR mengetahui tujuan dari pembangunan desa
2. Anggota OR mengetahui prosedur pembangunan desa
3. Anggota OR ikut dan aktif dalam pemantauan pembangunan desa

SOAL DISKUSI :

1. Apakah anggota OR mengetahui tujuan dari pembangunan desa?
2. Apakah anggota OR sudah mengikuti proses pembangunan desa?
3. Apakah anggota OR sudah pernah melakukan evaluasi terhadap pembangunan desa?

Modul 1.4. APBDesa Dalam Perspektif Desa

Tujuan:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang tata kelola pemerintahan desa
- 2) Masyarakat melakukan monitoring Dana Desa sesuai UU Desa No. 6/2014 beserta regulasi lainnya

Alat dan bahan :

- 1) Bahan Diskusi : APBDesa Dalam Perspektif Desa
- 2) Lembar respon peserta
- 3) Daftar hadir peserta
- 4) Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
1.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	3 Menit
2.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
3.	Mengawali Pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta : Apa yang ada di pikiran masyarakat ketika mendengar istilah APBDesa	5 Menit
4.	Memberikan lembar materi dan atau memutarkan film tentang APBDesa kepada kelompok atau peserta	18 Menit
5.	Diskusi masyarakat : 3 poin pertanyaan	15 Menit
6.	Persentasi kelompok	10 Menit
7	Penutup : 4) Menyampaikan rangkuman atas presentasi kelompok atau peserta 5) Minta peserta mengisi lembar respon 6) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta	6 Menit
	Total	60 Menit

Diskusi

APBDesa Dalam Perspektif Desa

Pelajari

Pengertian

Adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa melalui:

1. Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
2. Menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa
3. Kades menetapkan APBDesa/th dengan Peraturan Desa (Perdes)

Proses pengelolaan Keuangan Desa

1. Perencanaan, melalui RPJMDesa, RKP Desa, dan Rancangan APBDesa
2. Penganggaran, dalam Pendapatan Asli Desa, APBN, Bagi hasil pajak/retribusi, ADD, Bantuan, hibah, lain-lain pendapatan
3. Pelaksanaan kegiatan
4. Penata usahaan, dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank
5. Pelaporan, waktu semester I, dan semester akhir tahun
6. Pertanggungjawaban, dalam bentuk peraturan desa

Perubahan APBDesa secara umum

1. Harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja
2. SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
3. Penambahan dan/atau pengurangan dlm pendapatan desa pd thn berjalan
4. Peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan

Perubahan APBDesa mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemda.

1. Dapat dilakukan 1 kali dalam 1 T.A
2. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaks. APBDesa
3. Dalam hal Bankeu dari APBD Prov., Kab./Kota, hibah dan bantuan pihak ke-3 yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Perdes tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Perkades tentang perubahan APBDesa
4. Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.

INGAT :

1. Anggota OR memahami pengertian APBDesa
2. Anggota OR mengetahui dan memahami proses pengelolaan keuangan desa

3. Anggota OR berpartisipasi dalam proses pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa

SOAL DISKUSI :

1. Apakah anggota OR sudah memahami pengertian APBDesa?
2. Apakah anggota OR mengetahui proses dalam pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah anggota OR sudah pernah terlibat dalam perencanaan keuangan desa?

Modul 1.5. Penyusunan RPJMDesa

Tujuan:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang tata kelola pemerintahan desa
- 2) Masyarakat melakukan monitoring Dana Desa sesuai UU Desa No. 6/2014 beserta regulasi lainnya

Alat dan bahan :

- 1) Bahan Diskusi : Penyusunan RPJMDesa
- 2) Lembar respon peserta
- 3) Daftar hadir peserta
- 4) Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
1.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	3 Menit
2.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
3.	Mengawali Pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta : Apa yang ada di pikiran masyarakat ketika mendengar istilah RPJMDesa	5 Menit
4.	Memberikan lembar materi dan atau memutar film tentang RPJMDesa kepada kelompok atau peserta	18 Menit
5.	Diskusi masyarakat : 3 poin pertanyaan	15 enit
6.	Persentasi kelompok	10 Menit
7	Penutup : 1) Menyampaikan rangkuman atas presentasi kelompok atau peserta 2) Minta peserta mengisi lembar respon 3) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta	6 Menit
	Total	60 Menit

Diskusi

Penyusunan RPJMDesa

Pelajari

Memahami RPJMDesa

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
4. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
5. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
6. Dalam menyusun RPJM Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja
8. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota, yang memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa
9. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota
10. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa

Tujuan RPJMDesa

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Perubahan RPJMDesa Dan RKP Desa

1. RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa

Catatan:

1. RPJM Desa & RKP Desa berbentuk peraturan desa
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa
4. Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati/walikota

INGAT :

1. Anggota OR mengetahui pengertian kegiatan penyusunan RPJMDesa
2. Anggota OR mengetahui prosedur penyusunan RPJMDesa
3. Anggota OR ikut dan aktif dalam penyusunan RPJMDesa

SOAL DISKUSI :

1. Apakah anggota OR mengetahui tujuan dari penyusunan RPJMDesa?
2. Apakah anggota OR sudah mengikuti penyusunan RPJMDesa?
3. Apakah anggota OR merasa penting berperan dalam kegiatan penyusunan RPJMDesa?

Modul 1.6. Musyawarah Dusun

Tujuan:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang tata kelola pemerintahan desa
- 2) Masyarakat melakukan monitoring Dana Desa sesuai UU Desa No. 6/2014 beserta regulasi lainnya

Alat dan bahan :

- 1) Bahan Diskusi : Musyawarah Dusun
- 2) Lembar respon peserta
- 3) Daftar hadir peserta
- 4) Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
1.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	3 Menit
2.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
3.	Mengawali Pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta : Apa yang ada di pikiran masyarakat ketika mendengar istilah Musyawarah Dusun	5 Menit
4.	Memberikan lembar materi dan atau memutar film tentang Musyawarah Dusun kepada kelompok atau peserta	18 Menit
5.	Diskusi masyarakat : 3 poin pertanyaan	15 Menit
6.	Persentasi kelompok	10 Menit
7	Penutup : 1) Menyampaikan rangkuman atas presentasi kelompok atau peserta 2) Minta peserta mengisi lembar respon 3) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta	6 Menit
	Total	60 Menit

Diskusi

Musyawarah Dusun

Pelajari

Pengertian

Musyawarah dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali permasalahan dan potensi di tingkat dusun.

Peserta

1. Perwakilan Lorong
2. Perwakilan kelompok ekonomi di tingkat dusun
3. RTM
4. Unsur Anak
5. Unsur perempuan
6. Unsur Lembaga Kemasyarakatan desa
7. Anggota BPD dari perwakilan dusun tersebut
8. Pemerintah Desa.

Tahap Persiapan

1. Pokja perencanaan Desa menetapkan jadwal, tempat, peserta, dan agenda musdus
2. Pokja perencanaan Desa menyiapkan peralatan serta format format yang dibutuhkan, (spidol, kertas palano, daftar hadir, berita acara serta format-format F1, F2 dan F 3)

Tahap Pelaksanaan

1. Pendaftaran peserta musdus oleh pokja perencanaan desa;
 - a. Pokja perencanaan Desa memaparkan tujuan metode serta keluaran musyawarah dusun;
 - b. Pokja perencanaan Desa memfasilitasi penggalian masalah, penyebab dan potensi dusun dengan; menggunakan tiga alat kajian (Sketsa Dusun, Kalender Musim dan diagram kelembagaan);
 - c. Pokja perencanaan Desa mendokumentasikan proses dan hasil musyawarah dusun;
 - d. Menetapkan delegasi dusun untuk mengikuti lokakarya desa dan Musrenbang jangka menengah desa. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan

Tugas Delegasi Dusun

1. Membantu Pokja Perencanaan menyusun daftar masalah, penyebab dan potensi dusun berdasarkan hasil kajian yang disepakati.
2. Mengikuti Musyawarah RPJM Desa.
3. Menyampaikan hasil Musyawarah RPJM Desa kepada warga dusun.
4. Menyampaikan masalah dan potensi yang belum tergali dalam musdus pada Musyawarah desa.

INGAT :

1. Anggota OR mengetahui tujuan musyawarah dusun
2. Anggota OR mengetahui proses pelaksanaan musyawarah dusun
3. Anggota OR ikut dan aktif dalam kegiatan musyawarah dusun

SOAL DISKUSI :

1. Apakah anggota OR mengetahui tujuan dari musyawarah dusun?
2. Apakah anggota OR merasa penting terhadap pelaksanaan musyawarah dusun?
3. Apakah anggota OR pernah ikut dalam musyawarah dusun?

Modul 1.7. Penggalan Masalah Dan Sketsa Dusun Melalui Sketsa Desa**Tujuan:**

- 1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang tata kelola pemerintahan desa
- 2) Masyarakat melakukan monitoring Dana Desa sesuai UU Desa No. 6/2014 beserta regulasi lainnya

Alat dan bahan :

- 1) Bahan Diskusi : Penggalan Masalah Dan Sketsa Dusun Melalui Sketsa Desa
- 2) Lembar respon peserta
- 3) Daftar hadir peserta
- 4) Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
1.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	3 Menit
2.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
3.	Mengawali Pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta : Apa yang ada di pikiran masyarakat ketika mendengar istilah Penggalan Masalah Dengan Sketsa Desa	5 Menit
4.	Memberikan lembar materi dan atau memutar film tentang Penggalan Masalah Dengan Sketsa Desa kepada kelompok atau peserta	18 Menit
5.	Diskusi masyarakat : 3 poin pertanyaan	15 enit
6.	Persentasi kelompok	10 Menit
7	Penutup : 1) Menyampaikan rangkuman atas presentasi kelompok atau peserta 2) Minta peserta mengisi lembar respon	6 Menit

	3) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta	
	Total	60 Menit

Diskusi

Penggalian Masalah Dan Potensi Melalui Sketsa Desa

Pelajari

Pengertian

Sketsa dusun adalah gambaran dusun secara kasar/ umum mengenai keadaan dusun baik sumber daya fisik (alam dan buatan) maupun sumber daya lainnya. Sebagai alat kajian, sketsa dusun adalah alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan, penyebab dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah. Hasilnya dapat berupa masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, fisik dan non fisik

Tujuan

1. Memahami akan jenis, jumlah dan sumber daya di dusun;
2. Sebagai alat untuk menggali/ menjaring masalah dan penyebabnya yang ada di tingkat dusun terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar (Sarana dan Prasarana; Sosial budaya dan Ekonomi);
3. Sebagai alat untuk menggali/ menjaring potensi yang ada di tingkat dusun;
4. Menyamakan persepsi tentang masalah dan potensi yang ada di tingkat dusun.

Tahapan Penggunaan Teknik Pembuatan Sketsa Desa

- 1) Persiapan
 - a) Pilih dan Tentukan Peserta
 - b) Persiapkan Tempat yang memadai
 - c) Siapkanlah Format masalah Sketsa Dusun
 - d) Jelaskan tujuan kajian dengan Sketsa Dusun
 - e) Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano)
 - f) Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat)
- 2) Membuat sketsa desa
 - a) Pilihlah salah satu peserta yang paling mengetahui tentang batas-batas wilayah Desa/ Dusun
 - b) Ajak untuk membuat batas Desa/Dusun pada media yang tersedia
 - c) Sepakati bersama simbol/legenda dan tulis/gambar pada pojok kiri bawah sketsa dusun;
 - d) Ajak peserta untuk menggambar simbol yang disepakati dalam sketsa yang telah dibuat

- e) Ajak peserta untuk meneliti kembali sketsa dusun yang telah dibuat
 - f) Ajak Peserta untuk melakukan perbaikan kalau memang diperlukan.
1. Mewawancarai Sketsa Dusun
 - a) Galilah pengertian tentang Masalah, Kebutuhan, Hak-hak Dasar, Keinginan dan potensi
 - b) Ajaklah peserta untuk mewawancarai sketsa desa dari arah tertentu
 - c) Ketika menemui simbol/ legenda tanyakan pada peserta “ adakah masalah (Bidang Sarana Prasarana, Sosial Budaya, Ekonomi) pada hal tersebut?”
 - d) Ketika menemui masalah, tanyakanlah kepada peserta bagaimana kapasitas masalahnya (berapa banyak, berapa panjang, berapa luas dsb)
 - e) Tanyakan kepada peserta apa penyebab masalahnya.
 - f) Rumuskan pernyataan masalahnya dan catat dalam Format 1 Kolom 1
 - g) Ajaklah peserta untuk mendiskusikan akar penyebab masalah, hasilnya catat dalam kolom Format 1 Kolom 2
 - h) Diskusikan dengan peserta adakah potensi (SDA, SOSIAL, FISKAL, LEMBAGA) yang ada pada mereka dan lingkungannya yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah.
 - i) Catat potensi yang disepakati dalam format 1 kolom 3 (potensi)
 - j) Lakukan hal demikian sampai semua luasan sketsa dusun terwawancarai

INGAT :

1. Anggota OR memahami pengertian penggalan masalah dan potensi desa melalui sketsa desa
2. Anggota OR memahami proses dan prosedur penggalan masalah dan potensi desa melalui sketsa desa
3. Anggota OR ikut serta dalam kegiatan penggalan masalah dan potensi desa melalui sketsa desa

SOAL DISKUSI :

1. Apakah anggota OR memahami pentingnya penggalan masalah dan potensi desa melalui sketsa desa?
2. Apakah anggota OR mengetahui proses dan prosedur dalam kegiatan penggalan masalah dan potensi desa melalui sketsa desa?
3. Apakah anggota OR sudah pernah terlibat dalam kegiatan penggalan masalah dan potensi desa melalui sketsa desa?

Modul 1.8: Penggalan Masalah Dan Potensi Melalui Kalender Musim

Tujuan:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang tata kelola pemerintahan desa
- 2) Masyarakat melakukan monitoring Dana Desa sesuai UU Desa No. 6/2014 beserta regulasi lainnya

Alat dan bahan :

- 1) Bahan Diskusi : Penggalan Masalah Dan Potensi Melalui Kalender Musim
- 2) Lembar respon peserta
- 3) Daftar hadir peserta
- 4) Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
1.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	3 Menit
2.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
3.	Mengawali Pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta : Apa yang ada di pikiran masyarakat ketika mendengar istilah Penggalan Potensi Dan Masalah Dengan Kalender Musim	5 Menit
4.	Memberikan lembar materi dan atau memutar film tentang Proses Penggalan Potensi Dan Masalah Dengan Kalender Musim kepada kelompok atau peserta	18 Menit
5.	Diskusi masyarakat : 3 poin pertanyaan	15 Menit
6.	Persentasi kelompok	10 Menit
7	Penutup : 1) Menyampaikan rangkuman atas presentasi kelompok atau peserta 2) Minta peserta mengisi lembar respon 3) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta	6 Menit
	Total	60 Menit

Diskusi

Penggalian Masalah Dan Potensi Melalui Kalender Musim

Pelajari

Pengertian

Kalender musim adalah alat kajian untuk mengetahui kejadian/kegiatan dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan perubahan waktu.

Tujuan

1. Untuk mengetahui kegiatan dan aktifitas masyarakat berdasarkan perubahan waktu
2. Untuk mengetahui kejadian yang berkaitan dengan kebutuhan/hak dasar yang terjadi secara berulang dalam kehidupan masyarakat
3. Untuk mengetahui masa - masa kritis dalam kehidupan masyarakat

Tahapan Penggunaan Teknik Kalender Musim

a) PERSIAPAN

1. Siapkan Tempat yang memadai
2. Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, Kertas manila, gunting dan isolatif)
3. Siapkan format masalah kalender musim
4. Jelaskan tujuan kajian dengan kalender musim
5. Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat)

b) MEMBUAT KALENDER MUSIM

1. Ajaklah peserta mendiskusikan musim yang ada
2. Hasilnya tuliskan pada kolom yang tersedia
3. Ajaklah peserta untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian (masalah , kegiatan) penting yang berkaitan dengan kebutuhan dasar yang kejadiannya terus berulang
4. Tuliskanlah dalam kolom masalah/kejadian pada kalender musim
5. Ajaklah peserta mendiskusikan kapan biasanya kejadian-kejadian tersebut terjadi
6. Tuliskan dengan memberi tanda X pada kolom yang tersedia sesuai tingkat kejadian, mis: x: pernah terjadi xx: Agak sering xxx: sering xxxx: sangat sering

INGAT :

1. Anggota OR mengetahui tujuan dari pembuatan penggalian masalah dan potensi melalui kalender musim
2. Anggota OR mengetahui proses penggalian masalah dan potensi dengan kalender musim
3. Anggota OR aktif dalam pembuatan penggalian masalah dan potensi melalui kalender musim

SOAL DISKUSI :

1. Apakah anggota OR mengetahui tujuan dari penggalan masalah dan potensi melalui kalender musim?
2. Apakah anggota OR pernah ikut dalam kegiatan penggalan masalah dan potensi melalui kalender musim?
3. Apakah anggota OR merasa penting untuk ikut dalam kegiatan penggalan masalah dan potensi?

Modul 1.9. Penggalan Potensi Dan Masalah Dengan Diagram Kelembagaan

Tujuan:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang tata kelola pemerintahan desa
- 2) Masyarakat melakukan monitoring Dana Desa sesuai UU Desa No. 6/2014 beserta regulasi lainnya

Alat dan bahan :

- 1) Bahan Diskusi : Penggalan Potensi Dan Masalah Dengan Diagram Kelembagaan
- 2) Lembar respon peserta
- 3) Daftar hadir peserta
- 4) Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
1)	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	3 Menit
2)	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
3)	Mengawali Pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta : Apa yang ada di pikiran masyarakat ketika mendengar istilah Penggalan Masalah Dengan Diagram Kelembagaan	5 Menit
4)	Memberikan lembar materi dan atau memutar film tentang Proses Penggalan Masalah dan Potensi Dengan Diagram Kelembagaan kepada kelompok atau peserta	18 Menit
5)	Diskusi masyarakat : 3 poin pertanyaan	15 Menit
6)	Persentasi kelompok	10 Menit
7)	Penutup : 1) Menyampaikan rangkuman atas presentasi kelompok atau peserta 2) Minta peserta mengisi lembar respon 3) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian	6 Menit

	atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta	
	Total	60 Menit

Diskusi

Penggalian Masalah Dan Potensi Melalui Diagram Kelembagaan

Pelajari

Pengertian

Diagram Kelembagaan adalah gambaran keadaan lembaga yang ada serta peran dan pola hubungan dengan masyarakat. Diagram kelembagaan adalah alat untuk mengkaji masalah dan potensi berkaitan dengan kelembagaan.

Jenis-jenis Lembaga

1. Formal, lembaga yang mempunyai Badan Hukum
Contoh : Pemerintah Desa, BPD, LKMD, PKK, NU, kelompok tani, dll
2. Non Formal, lembaga yang tidak mempunyai Badan Hukum
Contoh : Kelompok arisan, Paguyuban tukang becak, kelompok yasinan, dll.

Tahapan Penggunaan Teknik Diagram Kelembagaan

1. Persiapan
 - Persiapkan Tempat yang memadai
 - Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, Kertas manila, gunting dan isolatif)
 - Siapkanlah Format masalah Diagram kelembagaan
 - Jelaskan tujuan kajian dengan Diagram kelembagaan
 - Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat)
2. Membuat Diagram Kelembagaan
 - Ajak peserta untuk mengidentifikasi lembaga yang ada diwilayah mereka
 - Tulis lembaga yang telah teridentifikasi pada media yang tersedia
 - Buat bulatan / lingkaran dari kertas manila dengan ukuran yang berbeda sebanyak lembaga yang teridentifikasi
 - Ajak peserta mendiskusikan pengaruh lembaga terhadap kehidupan masyarakat dari yang paling besar sampai yang paling kecil
 - Tuliskan nama lembaga yang pengaruhnya paling besar pada lingkaran yang paling besar demikian seterusnya sampai pada lembaga yang pengaruhnya paling kecil

Langkah-langkah Kegiatan

1. Buat sketsa dusun (hanya batas desa/ dusunnya saja) tuliskan kata masyarakat ditengahnya)
2. Tanyakan Kepada peserta lembaga-lembaga mana yang paling sering berhubungan dengan masyarakat.
3. Tempelkan bulatan yang telah ditulis nama lembaga pada sketsa dusun;

4. Jika sering berhubungan tempelkan dekat dengan kata masyarakat jika tidak sering berhubungan tempelkan jauh dari kata masyarakat
5. Lakukan hal demikian sampai semua bulatan tertempel pada sketsa desa

Menggali Masalah, Penyebab, Dan Potensi

1. Gali permasalahan dari lembaga yang teridentifikasi dari segi :
 - a. Struktur Organisasi
 - b. Kapasitas SDM
 - c. Manajemen Organisasi
 - d. Regulasi/ Pembuatan peraturan
2. Dikusikan penyebab mendasar dari masalah yang ada
3. Catat semua masalah dan potensi yang tergalikan dalam Format yang telah disediakan

INGAT :

4. Anggota OR mengetahui adanya proses penggalian masalah dan potensi dalam perencanaan desa
5. Anggota OR aktif dalam proses penggalian masalah dan potensi di desa

SOAL DISKUSI :

4. Apakah anggota mengetahui ada proses penggalian masalah dan potensi dalam perencanaan desa?
5. Apakah anggota OR sudah pernah ikut serta dalam kegiatan penggalian masalah dan potensi dengan menggunakan diagram kelembagaan?

BAB 2

Modul Pemberdayaan Difabel

Modul 2.1. Disabilitas Bagian Dari Keragaman

Tujuan :

1. Memberikan pemahaman tentang Konsep Disabilitas
2. Mendorong masyarakat agar memperjuangkan fasilitas umum yang ramah terhadap penyandang disabilitas
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar berhenti mengeluarkan ejekan atau stigma negatif terhadap para penyandang disabilitas

Alat dan bahan :

1. Bahan Diskusi : Pengertian Disabilitas bagian dari Keragaman
2. Lembar respon peserta
3. Daftar hadir peserta
4. Form Hasil Diskusi masyarakat

No	Kegiatan	Waktu
8.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	4 Menit
9.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
10.	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta: Apa yang ada di pikiran ketika mendengar kata Disabilitas	5 Menit
11.	Memberikan lembar materi dan atau Pemutaran filem sesuai dengan materi pengertian Disabilitas kepada kelompok atau peserta	13Menit
12.	Diskusi masyarakat : 3 point pertanyaan	10 Menit
13.	Prensentasi kelompok	15 Menit
14.	Penutup : 4) Menyampaikan rangkuman atas persentasi kelompok atau peserta 5) Minta peserta mengisi lembar respon 6) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang di capai serta keterlibatan seluruh peserta.	10 Menit
	Total	60 Menit

Waktu : 60 Menit

Pelajari :

Pernahkah anda melihat para penyandang disabilitas di sekeliling anda? Mungkin tidak semua dari kita pernah berinteraksi dengan para penyandang disabilitas, karena mereka masih menjadi masyarakat yang termarginalkan di Indonesia, tidak memiliki keleluasaan dalam beraktivitas, bahkan untuk mendapatkan pemenuhan hak asasi seperti pendidikan, pekerjaan dan kesehatan pun tidak mudah. Untuk memahami lebih lanjut mengenai disabilitas, mari kita pelajari konsepnya.

Penyandang disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia, tidak hanya laki-laki, perempuan, tinggi, pendek, hitam, putih, orang tua, anak, tetapi ada juga disabilitas dan non disabilitas. Oleh karena itu, penyandang disabilitas harus dianggap memiliki hak asasi yang sama dengan manusia lainnya yang tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau di hilangkan oleh siapapun. Dalam ruang lingkup suatu negara penyandang disabilitas adalah bagian dari warga negara yang hak asasinya wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Istilah disabilitas juga berbeda dengan istilah cacat, bahkan istilah disabilitas hadir untuk menggantikan istilah cacat yang bermakna negatif dan bahkan sudah identik dengan kata rusak atau tidak normal. Selain itu, istilah cacat fokus dengan cara pandang medis yaitu menilai hambatan yang dialami seseorang adalah karena kondisi fisiknya, misalnya seseorang yang terhambat untuk naik ke lantai dua suatu bangunan karena fisiknya yang menggunakan kursi roda, sedangkan disabilitas memandang hambatan yang dialami seseorang adalah karena lingkungan atau fasilitas yang tidak aksesibel, misalnya tidak bisanya pengguna kursi roda naik ke lantai dua bukan karena fisiknya, namun karena bangunan tersebut kurang melengkapi fasilitas dengan bidang landai atau lift yang menjadikannya dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas.

Dengan menggunakan istilah cacat yang fokus kepada fisik seseorang, maka muncul anggapan fisik yang normal dan tidak normal. Dimana penyandang cacat masuk dalam kategori tidak normal. Bahkan dalam pasal 5 ayat 2 undang-undang 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kecacatan masuk dalam kriteria masalah

sosial sedangkan dalam istilah disabilitas tidak ada kendala dengan kondisi fisik seseorang karena permasalahan hambatan dalam menjalankan aktivitas disebabkan oleh lingkungan atau fasilitas yang tidak aksesibel.

Oleh karena itu dalam konsep disabilitas semua manusia dianggap sama dengan berbagai keunikannya, dan keunikan itulah yang harus mampu diakomodasi oleh lingkungan di sekitarnya. Dari segi penyelesaian masalah cara pandang cacat berpikiran bahwa perubahan harus dilakukan terhadap ketidaknormalan fisik seseorang, sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau fasilitas yang sudah ada. Dengan cara pandang itu ditambah dengan anggapan bahwa penyandang cacat adalah seseorang yang tidak normal maka penyelesaian dilakukan dengan berdasar kepada belas kasih orang lain. Dengan berdasar pada belas kasih maka konsep penyelesaian pada istilah cacat hanya mengandalkan bantuan sosial belaka yang dijalankan apabila kebutuhan utama sudah terpenuhi. Bahkan keberadaannya bisa ada atau tidak bergantung kepada kebaikan hati pengalokasian anggaran, sedangkan dalam konsep disabilitas penyelesaian dilakukan dalam segala aspek kehidupan manusia dan pelaksanaannya masuk dalam komponen utama karena tidak membedakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan non disabilitas. Misalnya dalam pembangunan di bidang transportasi armada angkutan umum, harus memiliki desain yang ramah terhadap disabilitas, seperti memiliki bidang landai untuk akses masuk dan keluar dan memiliki sistem pengumuman yang berbentuk audio visual dan tactual, begitu pula dalam sektor pekerjaan pelatihan kerja harus aksesibel terhadap para penyandang disabilitas dan mampu mengarahkan penyandang disabilitas bekerja sesuai dengan minat dan bakatnya. Contoh lain yang menegaskan perbedaan disabilitas dan cacat dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam sektor pendidikan. Penyelenggara pendidikan masih menolak siswa penyandang disabilitas karena tidak tersedianya fasilitas belajar sehingga langsung dialihkan kepada sekolah luar biasa atau SLB. Alhasil pemahaman terhadap SLB menjelma menjadi sekolah khusus penyandang cacat. Semakin lama hanya melihat kepada kondisi fisik seseorang apakah dia tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan, tuli, pengguna kursi roda atau tunanetra. Mereka Langsung diarahkan untuk mendapatkan pendidikan di SLB. Sedangkan dalam cara pandang

disabilitas semua siswa diperlakukan sama sehingga selama sang siswa memenuhi syarat kemampuan untuk mengikuti kurikulum nasional, maka akan diarahkan pada sekolah umum formal.

Adapun kendala fasilitas seharusnya disediakan oleh pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan bagi warga negara dengan disabilitas. Dengan bersekolah di sekolah umum maka akan ada interaksi antara siswa penyandang disabilitas dan non disabilitas, dari interaksi itu akan timbul rasa saling memahami akan keunikan masing-masing siswa dan hal itu sangat baik untuk mengajarkan toleransi dalam berinteraksi social. Lalu apa yang bisa kita lakukan:

1. Setelah memahami konsep disabilitas maka tidak ada lagi alasan untuk menggunakan istilah cacat dalam menyebut penyandang disabilitas, dengan begitu setidaknya menghindarkan Penggunaan istilah negatif untuk menyebut sekelompok masyarakat tertentu.
2. Kedua Mari periksa bersama Apakah fasilitas dan pelayanan umum di sekitarmu sudah ramah untuk penyandang disabilitas, apakah sudah ada bidang landai atau lift sebagai alternatif penggunaan tangga? Apakah pusat informasi atau pengumuman sudah dilengkapi dengan bentuk-bentuk yang aksesibel seperti bentuk audio visual dan taktual? dan apakah para pemberi Layanan Umum sudah memahami konsep disabilitas dan tahu cara menghadapi penyandang disabilitas? apabila belum kemari layangkan masukan atau bahkan tuntutan kepada pihak terkait untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.
3. Berhentilah mengeluarkan ejekan atau pernyataan yang memunculkan stereotip negatif terhadap para penyandang disabilitas, misalnya mengolok-olok seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau skitsofrenia dengan ucapan orang gila atau menjadikan kata autis sebagai istilah negatif untuk menyebut seseorang yang tidak mau peduli dengan lingkungan sosialnya. Kita harus mulai hentikan dari diri kita sendiri dan mengkritisi bahkan melaporkan kepada kepolisian apabila ada yang melakukan penghinaan terhadap penyandang disabilitas.

Tiga hal itu dapat kita lakukan mulai dari sekarang dan mulai dari diri kita sendiri. Mari upayakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tas dalam kampanye disabilitas bergerak demi mewujudkan Indonesia yang ramah disabilitas

INGAT :

1. Penyandang disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia, tidak hanya laki-laki, perempuan, tinggi, pendek, hitam, putih, orang tua, anak, tetapi ada juga disabilitas dan non disabilitas
2. Istilah disabilitas juga berbeda dengan istilah cacat, bahkan istilah disabilitas hadir untuk menggantikan istilah cacat yang bermakna negatif dan bahkan sudah identik dengan kata rusak atau tidak normal
3. Berhentilah mengeluarkan ejekan atau pernyataan yang memunculkan stereotip negatif terhadap para penyandang disabilitas, misalnya mengolok-olok seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau skitsofrenia dengan ucapan orang gila atau menjadikan kata autis sebagai istilah negatif

SOAL DISKUSI :

1. Apakah menurut masyarakat belajar memahami konsep disabilitas itu penting ?
2. Apa kendala masyarakat dalam memperjuangkan fasilitas yang ramah terhadap kaum disabilitas yang ada didesa ?
3. Bagaimana pengalaman masyarakat ketika berintraksi dengan kaum disabilitas yang ada di desa ?

Modul 2.2 Bergerak Bersama Disabilitas

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=5T374edKwxk>

Tujuan:

- 3) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat cara berinteraksi dengan orang dengan disabilitas
- 4) Masyarakat mampu berinteraksi dan memperlakukan orang dengan disabilitas sama dengan yang lainnya
- 5) Adanya fasilitas umum yang ramah terhadap disabilitas di desa dampingan

Alat dan bahan :

- 5) Bahan Diskusi : Bergerak Bersama Disabilitas
- 6) Lembar respon peserta
- 7) Daftar hadir peserta
- 8) Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
15.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	3 Menit
16.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
17.	Mengawali Pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta : Apa yang ada di pikiran masyarakat ketika mendengar istilah disabilitas	5 Menit
18.	Memberikan lembar materi dan atau memutar film tentang Bergerak Bersama Disabilitas Dan Cara Berinteraksi kepada kelompok atau peserta	18 Menit
19.	Diskusi masyarakat : 3 poin pertanyaan	15 Menit
20.	Persentasi kelompok	10 Menit
7	Penutup : 7) Menyampaikan rangkuman atas presentasi kelompok atau peserta 8) Minta peserta mengisi lembar respon 9) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta	6 Menit

Diskusi

Bergerak Bersama Disabilitas

Pelajari

Fenomena Orang Dengan Disabilitas

Orang dengan disabilitas sering kali tidak mendapat fasilitas dan sering diperlakukan berbeda. Hal ini karena kebanyakan dari kita tidak tahu cara berinteraksi. Biasanya kita menghindar jika bertemu, tapi lebih sering kita keliru bersikap terhadap orang dengan disabilitas. Sekalipun awalnya maksud kita baik, perlakukanlah orang dengan disabilitas seperti kita mau diperlakukan orang lain.

Cara Berinteraksi Dengan Orang Dengan Disabilitas

Bertanya terlebih dahulu jika ingin membantu disabilitas netra misalnya. Apa kamu mau dipandu? Biarkan mereka yang memegang lenganmu, sesudah itu kamu bisa menuntunnya. Jika ingin menyapa orang yang sulit mendengar, kamu bisa menepuk pundaknya lalu bicara seperti biasa tidak terlalu cepat tidak terlalu lambat atau ditambah dengan bahasa isyarat, karena orang dengan disabilitas pendengaran bisa membaca gerak mulut dan bahasa isyarat jauh lebih baik daripada kita.

Kendala Yang Dihadapi Orang Dengan Disabilitas

Loket dengan fasilitas berkaca gelap, tidak membuat kita nyaman berkomunikasi. Orang dengan disabilitas pendengaran tidak bisa membaca gerak bibir. Trotoar rusak sangat berbahaya bagi pejalan kaki apalagi bagi yang berkursi roda, karena itu penting untuk mendorong perbaikan fasilitas umum.

Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Disabilitas

Undang-undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 berlaku sejak April 2016 memastikan agar perbaikan fasilitas umum turut memenuhi kebutuhan orang dengan disabilitas. Ada 25 sektor yang dibahas diantaranya transportasi, kesehatan, tenaga kerja, komunikasi dan fasilitas bangunan. Tanpa fasilitas kita sulit beraktifitas

dan karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda, maka semestinya fasilitas umum cocok buat semua orang termasuk untuk orang dengan disabilitas.

INGAT :

1. Anggota OR memahami persamaan hak dan kewajiban warga negara
2. Anggota OR mengetahui dan memahami cara berinteraksi dan memperlakukan orang dengan disabilitas
3. Anggota OR berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan desa yang ramah terhadap orang dengan disabilitas

SOAL DISKUSI :

6. Apakah anggota OR sudah memahami persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara?
7. Apakah anggota OR mengetahui cara berinteraksi dengan orang dengan disabilitas?
8. Apakah anggota OR sudah pernah terlibat dalam perencanaan pembangunan di desa dan mengusulkan program yang ramah terhadap orang dengan disabilitas?

Modul 2.3 Disabilitas Sebagai Isu Multisektor

Tujuan:

- 6) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perbedaan cacat dan disabilitas
- 7) Masyarakat tidak membedakan hak politik dengan disabilitas
- 8) Adanya kesempatan disabilitas untuk menjadi pemimpin

Alat dan bahan :

- 9) Bahan Diskusi : Disabilitas sebagai isu multisektor
- 10) Lembar respon peserta
- 11) Daftar hadir peserta
- 12) Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
21.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	3 Menit
22.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
23.	Mengawali Pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta : Apa yang ada di pikiran masyarakat ketika mendengar istilah disabilitas sebagai isu multisektor	5 Menit
24.	Memberikan lembar materi dan atau memutar film tentang Disabilitas sebagai isu multisektor	18 Menit
25.	Diskusi masyarakat : 3 poin pertanyaan	15 Menit
26.	Persentasi kelompok	10 Menit
7	Penutup : 10) Menyampaikan rangkuman atas presentasi kelompok atau peserta 11) Minta peserta mengisi lembar respon 12) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta	6 Menit

Diskusi

Disabilitas Sebagai Isu Multisektor

Pelajari

Istilah disabilitas bisa jadi belum begitu banyak dikenal karena masyarakat masih lebih mengenal istilah cacat. Walaupun begitu istilah cacat sudah harus ditinggalkan karena sudah bermakna negative, bahkan sudah identik dengan kata rusak atau tidak normal. Selain bermakna positif, istilah disabilitas juga memiliki dimensi yang berbeda dengan cacat. Disabilitas merupakan sebuah isu yang bersifat multi sektor yaitu terkait dengan berbagai bidang, sedangkan cacat hanya berkaitan dengan bidang social. Perubahan itu bersumber dari cara pandang yang bergeser, istilah cacat hanya melihat dari pendekatan medis yang fokus pada kondisi fisik seseorang sehingga muncul penilaian normal atau tidak normal terhadap fisik seseorang.

Namun saat ini istilah cacat sudah diubah menjadi disabilitas yang lebih menggunakan perspektif hak asasi manusia, dalam perspektif itu maka kondisi disabilitas hadir ketika seseorang tidak dapat berinteraksi secara baik karena ada hambatan hambatan yang menghalangi. Oleh karena itu dalam pendekatan baru ini upaya penyelesaian masalah harus difokuskan pada menghilangkan hambatan-hambatan, bukan lagi terlalu fokus kepada kondisi fisik seseorang. Peletakan disabilitas sebagai isu multisektor pada dasarnya bukan hal baru di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah yang sudah mengatur tentang disabilitas atau setidaknya mencantumkan kata cacat dalam batang tubuhnya. Keseluruhan peraturan perundang-undangan itu terdiri dari 20 sektor yang berbeda yaitu kebencanaan, hukum, HAM, politik, infrastruktur, kepegawaian, kependudukan, kesehatan, kesejahteraan social, olahraga, otonomi daerah, pajak, pelayanan public, pendidikan, perdagangan,, pertahanan, profesi, tenaga kerja dan transportasi. Walaupun begitu penempatan disabilitas sebagai isu multisektor ternyata masih sebatas dalam tataran formal dan belum masuk substantive, sehingga masih terkendala dalam hal implementasi.

Dalam pasal 69 undang-undang nomor 24 tahun 2007 yang mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana. Dalam pasal itu kondisi kecacatan menjadi patokan dalam pemberian hak, sehingga pertimbangan yang muncul adalah karena rasa belas kasih kepada kondisi fisik seseorang. Seharusnya suatu kebijakan mengintervensi pada pemenuhan hak dan upaya menghilangkan hambatan, bukan pada bantuan dana yang dianggap menjadi satu-satunya kebutuhan dari seorang penyandang disabilitas. Sehingga permasalahan dipandang sangat sederhana bahkan bantuan dana pada dasarnya tidak dibutuhkan. Apabila hal yang mendasar seperti mendapatkan fasilitas pengobatan, fasilitas kembali mendapatkan pekerjaan dan aksesibilitas dapat dipenuhi maka tidak ada hambatan yang terjadi pasca kecelakaan. Masih lekatnya cara pandang cerita pada ketentuan terkait dengan penyandang

disabilitas banyak disebabkan karena adanya ketentuan dalam pasal 5 ayat 2 undang-undang nomor 11 tahun 2009 yang menjadikan kecacatan pada seseorang sebagai kriteria masalah social. Ketentuan itu berhasil membuat stigma bahwa penyandang disabilitas adalah pembawa masalah, ketentuan itu sangat kental dengan cara pandang medis yang melihat seseorang penyandang disabilitas sebagai manusia yang tidak normal.

pengaturan mengenai sehat jasmani dan rohani mengalami perubahan pada pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 4 Tahun 1979 menegaskan, bahwa kecacatan adalah kondisi terhambatnya jasmani dan rohani sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi cacat adalah kondisi tidak sehat jasmani dan rohani. Ketentuan itu bertahan selama hampir 26 tahun sebelum disahkannya undang-undang nomor 14 tahun 2005 yang pada penjelasan pasal 8 dinyatakan bahwa cacat tidak masuk dalam kriteria jasmani dan rohani, selanjutnya ketentuan itu dirujuk lagi dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 yang menegaskan hal yang sama dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengisian jabatan seorang presiden dan wakil presiden tidak memperhatikan kondisi disabilitasnya.

INGAT :

1. Anggota OR memahami persamaan hak dengan disabilitas
2. Anggota OR mengetahui dan memahami perbedaan antara cacat dan disabilitas
3. Anggota OR memberikan kesempatan kepada disabilitas untuk terlibat dalam politik

SOAL DISKUSI :

9. Apakah anggota OR sudah memahami persamaan hak dengan disabilitas?
10. Apakah anggota OR mengetahui perbedaan cacat dan disabilitas?
11. Apakah anggota OR sudah memberikan kesempatan kepada disabilitas untuk terlibat dan ambil bagian dalam politik?

Modul 2.4 Kunci Hak Atas Penyandang Disabilitas

Tujuan :

1. Memberikan pemahaman tentang Hak Atas Penyandang Disabilitas
2. Mendorong masyarakat agar memperjuangkan hak penyandang disabilitas yang ada di desa.
3. Adanya fasilitas umum yang ramah terhadap disabilitas di desa dampingan

Alat dan bahan :

1. Bahan Diskusi : Hak Atas Penyandang Disabilitas
2. Lembar respon peserta
3. Daftar hadir peserta
4. Form Hasil Diskusi masyarakat

No	Kegiatan	Waktu
27.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	4 Menit
28.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
29.	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta: Apa yang ada di pikiran ketika mendengar kata Hak Penyandang Disabilitas	5 Menit
30.	Memberikan lembar materi dan atau Pemutaran film sesuai dengan materi pengertian Disabilitas kepada kelompok atau peserta	13Menit
31.	Diskusi masyarakat : 3 point pertanyaan	10 Menit
32.	Presentasi kelompok	15 Menit
33.	Penutup : 13) Menyampaikan rangkuman atas persentasi kelompok atau peserta 14) Minta peserta mengisi lembar respon 15) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang di capai serta keterlibatan seluruh peserta.	10 Menit
	Total	60 Menit

Waktu : 60 Menit

Pelajari

:

Empat kunci hak atas penyandang disabilitas merupakan isu hak asasi manusia dan kemanusiaan, orang dengan disabilitas adalah warga negara yang berhak atas hak-hak yang dijamin pemenuhannya oleh negara. Orang dengan

disabilitas adalah warga negara yang sering mengalami hambatan ketika mengakses pelayanan publik Padahal kita punya hak yang sama. Hal itu dijamin dalam undang-undang dasar 1945 dan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disabilitas Ismi termasuk disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas mental, dan disabilitas intelektual, apa ya yang sebaiknya pemerintah pusat dan pemerintah daerah lakukan agar mereka terlibat aktif berinteraksi dalam masyarakat. Yang harus di perhatikan adalah.

1. Pertama pastikan ada fasilitas yang aksesibel bagi orang dengan disabilitas, gunakan tangga darurat jika terjadi kebakaran sebagai pengguna kursi roda kemungkinan saya Slamet kecil. fasilitas yang aksesibel perlu ada di setiap bangunan misalnya ramp untuk pengguna kursi roda. Informasi visual atau teks untuk orang dengan hambatan pendengaran jadinya formasi audio untuk orang dengan hambatan penglihatan semua fasilitas itu harus tersedia di setiap ruang umum terutama dalam pelayanan public.

2. kedua Anda harus pastikan cara melayaninya pun ramah dan sesuai kebutuhan, Ada yang bisa saya bantu Bapak mau beli tiket atau menjemput seseorang ? Oh mau beli tiket biar saya Tuliskan di depan terus lalu kemudian belok kiri. Sama-sama.

ketika berkomunikasi dengan orang Berhambatan pendengaran, Anda tidak boleh menggunakan masker. Salah satu cara mereka berkomunikasi adalah membaca gerak bibir, bisa juga pakai tulisan atau bahasa isyarat. Jadi penting bagi seorang petugas layanan publik untuk bisa berbahasa isyarat. Intinya cara melayani yang ramah dilakukan dengan melihat kebutuhan yang menghilangkan hambatannya. contohlain cara menuntun orang dengan hambatan penglihatan. Mau saya bantu menyeberang Pak? Terima kasih. Pelayanan di berikan setelah ada persetujuan ketika menuntun biarkan ia memegang lengan kiri kita dengan tangan kanan kita, jalan saja Seperti biasa sambil memberi tahu jalan menanjak atau menurun atau jika harus pelan-pelan dan hati-hati jangan sampai ada mendorongnya atau bahkan menariknya.

3. Anda harus selalu melihat dari kemampuannya bukan hambatannya, Selamat pagi Pak ? Selamat pagi Bu selamat pagi Adek. saya mau mendaftarkan anak saya

sekolah di sini, saya mohon maaf sekali Bu sekolah kami tidak menerima anak dengan disabilitas intelektual. Selamat pagi adik, selamat pagi ibu ada yang bisa kami bantu? anak saya mau mendaftar sekolah di sini namun ditolak karena alasan kedisabilitasannya anak saya. Oh seharusnya tidak boleh begitu, kondisi disabilitas seseorang tidak menutup kesempatannya untuk mendapatkan akses Pendidikan. termasuk untuk anak ibu, Sekolah seharusnya memberikan fasilitas kepada setiap anak tanpa kecuali. karena masing-masing anak punya caranya sendiri untuk belajar. Anda harus melihat kemampuan mereka dengan caranya masing-masing pemberi layanan harus mampu melayani seorang disabilitas seperti warga negara lainnya. termasuk untuk mengakses hak atas pendidikan tempat

4. Anda harus melihat dan memastikan semua fasilitas pelayanan sudah dirumuskan dalam regulasi, instrumen perencanaan, dan pengalokasian anggaran, fasilitas dan pelayanan yang maksimal bagi disabilitas harus dibunyikan dalam regulasi dan perencanaan seperti melalui rencana pembangunan jangka menengah atau dalam rencana aksi nasional hak asasi manusia. agar implementasinya dapat diawasi dan terukur, Selain itu perwujudan pemenuhan fasilitas dan pelayanan aksesibel bagi disabilitas juga harus didukung dengan alokasi anggaran yang cukup .dengan begitu, penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas dapat dilakukan secara sistem yang berjalan terus-menerus.

ini adalah 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas, keseluruhan hal itu bersifat multisektor sehingga menjadi urusan lintas kementerian dan lembaga yang menyangkut aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia. Selain contoh-contoh yang telah disebutkan masih banyak ragam ragam selain yang ada Mari bersama-sama wujudkan lingkungan Indonesia inklusif Indonesia yang ramah disabilitas

INGAT :

1. Penyandang disabilitas adalah warga negara yang berhak atas hak-hak yang dijamin pemenuhannya oleh negara.
2. Penyandang disabilitas adalah warga negara yang sering mengalami hambatan ketika mengakses pelayanan publik Padahal kita punya hak yang sama.
3. Hak Penyandang Disabilitas dijamin dalam undang-undang dasar 1945 dan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disabilitas Ismi

termasuk disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas mental, dan disabilitas intelektual,

SOAL DISKUSI :

1. Apakah menurut masyarakat belajar memahami Hak penyandang disabilitas itu penting ?
2. Apa kendala masyarakat dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas yang ada di desa?
3. Apakah anggota OR sudah pernah terlibat dalam perencanaan pembangunan di desa dan mengusulkan program yang ramah terhadap orang dengan disabilitas

Modul 2.5 Disabilitas Bukan Hambatan

<https://www.youtube.com/watch?v=xnZ0vz9Q-QY>

Tujuan :

4. Memberikan pemahaman tentang Disabilitas Bukan Hambatan
5. Mendorong kaum disabilitas agar menggunakan hak-hak dasar
6. Mendampingi kaum disabilitas agar memperjuangkan hak dasarnya

Alat dan bahan :

5. Bahan Diskusi : Disabilitas Bukan Hambatan
6. Lembar respon peserta
7. Daftar hadir peserta
8. Form Hasil Diskusi masyarakat

No	Kegiatan	Waktu
34.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	4 Menit
35.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
36.	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta: Apa yang ada di pikiran ketika mendengar kata Hambatan	5 Menit
37.	Memberikan lembar materi dan atau Pemutaran filem sesuai dengan materi Disabilitas bukan Hambatan kepada kelompok atau peserta	13Menit
38.	Diskusi masyarakat : 3 point pertanyaan	10 Menit
39.	Presentasi kelompok	15 Menit
40.	Penutup : 16) Menyampaikan rangkuman atas persentasi kelompok atau peserta 17) Minta peserta mengisi lembar respon 18) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang di capai serta keterlibatan seluruh peserta.	10 Menit
	Total	60 Menit

Waktu : 60 Menit

Pelajari : Tahukah kamu ? Menurut data Badan Pusat Statistik berdasarkan survei penduduk antar sensus 2015 8,56% penduduk Indonesia atau setara dengan 21 juta jiwa , adalah penyandang disabilitas seseorang termasuk penyandang disabilitas apabila memiliki hambatan dalam waktu yang panjang dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Namun hambatan itu tidak boleh menghalangi seorang penyandang disabilitas untuk mendapatkan seluruh hak-hak dasarnya sebagai seorang manusia, jaminan penghormatan perlindungan dan pemenuhan

hak penyandang disabilitas sudah ada dalam konstitusi negara Indonesia. Selain itu secara khusus Indonesia juga telah memiliki undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dengan adanya jaminan peraturan perundang-undangan tersebut maka tidak boleh ada lagi peraturan kebijakan atau bahkan perlakuan yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Mari wujudkan pembangunan yang inklusif dengan prinsip aksesibilitas partisipasi dan anti diskriminasi menuju Indonesia yang impulsif 2030.

INGAT :

2. seseorang termasuk penyandang disabilitas apabila memiliki hambatan dalam waktu yang panjang dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.
2. hambatan itu tidak boleh menghalangi seorang penyandang disabilitas
3. Adanya jaminan perundang undangan tidak ada lagi perlakuan diskriminatif terhadap kaum disabilitas

4. SOAL DISKUSI :

4. Apakah kaum disabilitas memiliki hambatan dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari ?
5. Apa kendala kaum disabilitas dalam mengembangkan kariernya ?
6. Bagaimana pengalaman kaum disabilitas dalam memperjuangkan hak hak dasarnya ?

BAB 3

MODUL PENDIDIKAN POLITIK KRITIS

Modul 3.1. Pengertian Politik

Tujuan :

7. Memberikan pemahaman tentang Politik dan tujuan dari politik
8. Mendorong masyarakat agar menggunakan Hak Politiknya sebagai warga negara
9. Mendampingi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan Politik baik di desa maupun di tingkat Pemerintahan.

Alat dan bahan :

9. Bahan Diskusi : Pengertian Politik
10. Lembar respon peserta
11. Daftar hadir peserta
12. Form Hasil Diskusi masyarakat

No	Kegiatan	Waktu
41.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	4 Menit
42.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
43.	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta: Apa yang ada di pikiran ketika mendengar kata Politik	5 Menit
44.	Memberikan lembar materi dan atau Pemutaran filem sesuai dengan materi pengertian politik kepada kelompok atau peserta	13Menit
45.	Diskusi masyarakat : 3 point pertanyaan	10 Menit
46.	Prensentasi kelompok	15 Menit
47.	Penutup : 19) Menyampaikan rangkuman atas persentasi kelompok atau peserta 20) Minta peserta mengisi lembar respon 21) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang di capai serta keterlibatan seluruh peserta.	10 Menit
	Total	60 Menit

Waktu : 60 Menit

Pelajari :

Politik dapat dikatakan sebagai sebuah seni dan ilmu untuk dapat meraih kekuasaan baik itu yang diraih secara konstitusional maupun inkonstitusional. Secara

bahasa, politik sendiri berasal dari bahasa Yunani politikos yang artinya dari, untuk, dan yang berkaitan dengan warga negara.

Pengertian politik menurut (Ramlan Surbakti) adalah suatu proses interaksi dalam tataran pemerintah maupun masyarakat untuk menentukan sebuah kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Wikipedia Indonesia menyebutkan politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Beberapa sudut pandang lain mengenai politik dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik aristoteles).
- 2) Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
- 3) Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.

A. Tujuan

Politik

1. Mengusahakan agar terjadi kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintahan, yang nantinya dapat diperoleh, digunakan, dikelola, serta diterapkan sesuai norma hukum yang berlaku.

1. Mengusahakan agar kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintahan tadi, dapat diperoleh, diterapkan, digunakan, dan dikelola berdasarkan kaidah demokrasi yang berlaku secara umum.

2. Mengusahakan agar kekuasaan tadi dapat diperoleh, diterapkan, digunakan, dan dikelola guna mempertahankan kerangka NKRI.

B. Hak Politik Warga Negara

Pada tingkat undang-undang, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa: "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

INGAT :

5. Politik adalah suatu proses interaksi dalam tataran pemerintah maupun masyarakat untuk menentukan sebuah kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

2. Setiap warga negara bebas menggunakan hak suaranya dan menentukan siapa pemimpin di desa maupun di tingkat Pemerintahan.

3. Setiap warga memahami tujuan dari politik

SOAL DISKUSI :

7. Apakah menurut masyarakat belajar politik itu penting ?

8. Apa kendala masyarakat dalam menggunakan hak politik ?

9. Bagaimana pengalaman masyarakat dalam menggunakan Hak sebagai masyarakat desa ?

Modul 3.2 Hak Dasar Warga Negara, Serta HAK Masyarakat Desa Sesuai dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014 PAL 68

Tujuan :

1. Memberikan pemahaman tentang pengertian hak sebagai Masyarakat Desa
2. Mendorong masyarakat agar memperjuangkan haknya sebagai Masyarakat Desa
3. Mendampingi masyarakat agar menggunakan haknya sebagai Masyarakat Desa

Alat dan bahan :

1. Bahan Diskusi : Hak Masyarakat Desa
2. Lembar respon peserta
3. Daftar hadir peserta
4. Form Hasil Diskusi Masyarakat

No	Kegiatan	Waktu
48.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	4 Menit
49.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
50.	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta: Apa yang ada di pikiran masyarakat, ketika mendengar kata Politik kata Hak Asasi Manusia	5 Menit
51.	Memberikan lembar materi dan atau Pemutaran filem sesuai dengan materi pengertian Hak Asasi Manusia kepada kelompok atau peserta	13 Menit
52.	Diskusi masyarakat : 3 point pertanyaan	10 Menit
53.	Presentasi kelompok	15 Menit
54.	Penutup : 22) Menyampaikan rangkuman atas presentasi kelompok atau peserta 23) Minta peserta mengisi lembar respon 24) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang di capai serta keterlibatan seluruh peserta.	10 Menit
	Total	60 Menit

Waktu : 60 Menit

Pelajari :

A. Pengertian Hak

adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dimana

penggunaannya tergantung kepada orang tersebut dengan rasa tanggung jawab. Pendapat lain mengatakan bahwa arti hak adalah segala sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak manusia tersebut masih di dalam kandungan. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain.

Hak dan kewajiban harus seimbang. Ini maksudnya tidak boleh hanya menuntut hak tetapi tidak mau melakukan kewajiban.

beberapa contoh hak sebagai warga negara adalah sebagai berikut:

1. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum.
2. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak.
3. Setiap warga negara memiliki hak atas lapangan kerja dan penghidupan yang layak.
4. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.
5. Setiap warga negara berkedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
6. Setiap warga negara memiliki hak untuk mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Contoh hak Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan desa, serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan desa
2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
3. Menyampaikan Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tulisan penyelegaraan pemerintan desa, pelaksanaan pembangunan desa memilih, dipilih atau di tetapkan menjadi.
 - 1 Kepala Desa
 2. Perangkat Desa
 3. Anggota bandan pemusyawaratan Desa
 4. Anggota lembaga Kemasyarakatan

INGAT :

1. Setiap warga negara Indonesia mengetahui hak dasar serta haknya sebagai Masyarakat Desa
2. Setiap masyarakat berhak memperjuangkan hak nya sebagai Masyarakat Desa
3. Setiap masyarakat berhak menggunakan hak nya sebagai Masyarakat Desa

SOAL DISKUSI :

1. Apakah masyarakat desa sudah memperoleh hak pelayanan yang sama dan adil dari pemerintahan desa ?

2. Apakah masyarakat desa ikut mengambil bagian dalam mengawasi kegiatan penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan desa ?
3. Apakah masyarakat desa sudah memperjuangkan haknya sebagai masyarakat desa dan apa saja contoh perjuangan hak yang sudah pernah di perjuangkan ?

Modul 3.3 Kewajiban Sebagai Warga Negara dn Kewajiban Masyarakat Desa sesuai dengan UU Desa n0. 6 Tahun 2014 Pasal 68

Tujuan :

1. Memberikan pemahaman tentang pengertian kewajiban sebagai warga negara dan kewajiban sebagai masyarakat desa
2. Mendorong masyarakat agar menjalankan kewajibannya sebagai masyarakat desa
3. Mendampingi masyarakat agar bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai Masyarakat desa

Alat dan bahan :

1. Bahan Diskusi : kewajiban sebagai warga negara dan kewajiban sebagai masyarakat desa
2. Lembar respon peserta
3. Daftar hadir peserta
4. Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
55.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	4 Menit
56.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
57.	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta: Apa yang ada di pikiran masyarakat ketika mendengar kata Kewajiban	5 Menit
58.	Memberikan lembar materi dan atau Pemutaran filem sesuai dengan materi pengertian Kewajiban kepada kelompok atau peserta	13 Menit
59.	Diskusi masyarakat : 3 point pertanyaan	10 Menit
60.	Presentasi kelompok	15 Menit
61.	Penutup : 25) Menyampaikan rangkuman atas persentasi kelompok atau peserta 26) Minta peserta mengisi lembar respon 27) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang di capai serta keterlibatan seluruh peserta.	10 Menit
	Total	60 Menit

Pelajari :

B. Pengertian Kewajiban

Adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum. Pendapat lain mengatakan arti kewajiban adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan haknya. Atau sebaliknya, seseorang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya.

contoh kewajiban sebagai warga negara adalah sebagai berikut:

1. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Setiap orang yang memiliki penghasilan dengan jumlah tertentu memiliki kewajiban untuk membayar pajak.
3. Setiap individu wajib menghormati hak asasi manusia dan menghargai orang lain.
4. Setiap warga negara berkewajiban untuk mengikuti dan menaati peraturan yang berlaku di Indonesia.
5. Setiap individu yang sudah dewasa memiliki kewajiban untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Contoh Kewajiban Masyarakat Desa Sebagai Berikut:

1. Membangun diri dan memelihara desa
2. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, membina kemasyarakatan desa
3. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di desa
4. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa

INGAT :

4. Setiap warga negara Indonesia mengetahui kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia dan kewajibannya sebagai Masyarakat Desa
5. Setiap masyarakat harus menjalankan kewajibannya sebagai Masyarakat Desa
6. Setiap masyarakat harus terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pembangunan desa.

SOAL DISKUSI :

4. Apakah masyarakat desa sudah menjalankan kewajibannya sebagai Masyarakat Desa ?
5. Apakah masyarakat desa ikut mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang di laksanakan di desa ?
6. Apakah masyarakat desa sudah mengikuti dan menaati setiap peraturan yang sudah di sepakati bersama di desa ?

Modul 3.4 Pengertian Demokrasi dan Pemilihan Umum

Tujuan :

1. Memberikan pemahaman tentang pengertian Demokrasi
2. Memberikan pemahaman tentang pengertian Pemilihan Umum
3. Mendorong masyarakat agar terlibat dalam proses pengambilan kebijakan yang lazim kita sebut sebagai demokrasi

Alat dan bahan :

1. Bahan Diskusi : Demokrasi dan Pemilihan umum
2. Lembar respon peserta
3. Daftar hadir peserta
4. Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
62.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	4 Menit
63.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
64.	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta: Apa yang ada di pikiran masyarakat ketika mendengar kata Demokrasi	5 Menit
65.	Memberikan lembar materi dan atau Pemutaran filem sesuai dengan materi pengertian Demokrasi kepada kelompok atau peserta	13 Menit
66.	Diskusi masyarakat : 3 point pertanyaan	10 Menit
67.	Presentasi kelompok	15 Menit
68.	Penutup : 28) Menyampaikan rangkuman atas persentasi kelompok atau peserta 29) Minta peserta mengisi lembar respon 30) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang di capai serta keterlibatan seluruh peserta.	10 Menit
	Total	60 Menit

Pelajari :

A. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu Demos ; rakyat dan Kratos : Pemerintahan

Menurut Prof Miriam Budiarmo, Demokrasi adalah Sistem Organisasi dan Sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Sedangkan menurut Drs. Inu Kencana Syafie Demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.

Demokrasi pada prakteknya memiliki 2 bentuk dasar, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.

B. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum / Pemilu adalah : sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

C. Mengapa kita harus ikut memilih dalam Pemilu ?

Pemilu sebagai alat demokrasi sesuai dengan tuntutan reformasi dan juga sesuai dengan dasar negara kita. Pemilu merupakan suatu cara yang kompetitif untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin atau wakil rakyat yang bisa menampung aspirasi rakyat. Memberikan peluang untuk mendapatkan seorang pemimpin yang tepat. Dengan sistem pemilihan yang secara prinsipnya berdasarkan suara terbanyak, hal tersebut sudah dapat memberikan peluang kepada kita semua yang berkedudukan sebagai rakyat untuk bisa menentukan siapakah yang terbaik untuk dapat memimpin serta menjadi perwakilan bagi Negara ini.

Pemilu merupakan mekanisme pemilihan pimpinan secara adil (fair). Dengan suara terbanyak , maka sistem pemilu bisa dikatakan sangat adil. Semakin banyak orang baik yang tidak ikut pemilu (golput), berarti membiarkan partai, caleg atau calon kepala negara / daerah yang buruk memenangi pemilu.

INGAT :

7. Setiap warga negara Indonesia mengetahui Bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi
8. Pemilu merupakan mekanisme pemilihan pimpinan secara adil
9. Setiap warga negara mengetahui Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

SOAL DISKUSI :

7. Apakah masyarakat desa sudah memperoleh hak politiknya sebagai warga negara?
8. Apakah masyarakat desa ikut mengambil bagian dalam kegiatan pemilihan ?
9. Mengapa masih ada masyarakat yang enggan untuk menyampaikan pendapatnya dalam kegiatan-kegiatan desa atau dalam pengambilan keputusan yang di laksanakan di desa. ?

Modul 3.5 Asas Dalam Pemilu dan Hal Yang Perlu Diketahui Sebelum Menentukan Pemilihan

Tujuan :

1. Memberikan pemahaman tentang asas dalam pemilu
2. Mendorong masyarakat agar mampu menentukan pilihannya pada saat pemilihan umum berlangsung

Alat dan bahan :

1. Bahan Diskusi : Asas dalam pemilu
2. Lembar respon peserta
3. Daftar hadir peserta
4. Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
69.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	4 Menit
70.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
71.	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta: Apa yang ada di pikiran masyarakat ketika mendengar kata Asasi dalam Pemilu	5 Menit
72.	Memberikan lembar materi dan atau Pemutaran filem sesuai dengan materi pengertian Asasi Pemilu kepada kelompok atau peserta	13 Menit
73.	Diskusi masyarakat : 3 point pertanyaan	10 Menit
74.	Presentasi kelompok	15 Menit

75.	Penutup : 31) Menyampaikan rangkuman atas persentasi kelompok atau peserta 32) Minta peserta mengisi lembar respon 33) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang di capai serta keterlibatan seluruh peserta.	10 Menit
	Total	60 Menit

Pelajari :

D. Asas dalam pemilu LUBER JURDIL

Langsung : Pemilih hadir langsung di TPS tanpa diwakili oleh siapapun

Umum : pemilihan berlaku untuk semua WNI, laki-laki dan perempuan (untuk Pemilu), dan penduduk yang berdomisili di daerah tersebut (untuk Pilkada) yang dibuktikan dengan KTP El atau suket dari Disdukcapil;

Bebas : pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa adanya ancaman atau paksaan dari pihak lain;

Rahasia : Pemilih berhak untuk merahasiakan pilihannya

Jujur : tidak ada manipulasi dalam pemungutan suara, baik dari pemilih, peserta pemeliharaan maupun dari penyelenggara pemilihan;

Adil : tidak ada perlakuan diskriminasi terhadap pemilih maupun peserta pemilihan;

E. Hal yang perlu diketahui sebelum menentukan Pilihan

1. Ketahui Visi, Misi, dan Program pasangan calon.
2. Kenali Riwayat Hidup Calon, bukan pelaku KDRT, korupsi, kekerasan atau perdagangan perempuan dan anak.
3. Pastikan Pilihan Anda tanpa dipengaruhi uang dan paksaan orang lain.

INGAT :

1. Setiap warga negara Indonesia mengetahui asas dalam pemilu
2. Setiap Masyarakat berhak menentukan sendiri pilihannya dalam pemilu dalam menentukan pemimpin di desa maupun di tingkat Pemerintahan.
3. Setiap warga negara mengetahui Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

SOAL DISKUSI :

10. Apa penyebab masyarakat masih enggan untuk menggunakan Hak suaranya (Golput) dalam pemilu ?
11. Apa kendala masyarakat dalam menentukan pilihan pada saat pemilu berlangsung ?
12. Bagaimana pengalaman masyarakat dalam menggunakan hak suaranya dalam pilkada di tahun 2020, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Karo ?

Modul 3.6. Pengertian Partisipasi Politik

Tujuan :

1. Memberikan pemahaman tentang pengertian partisipasi politik
2. Mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan politik
3. Mendampingi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan Politik baik di desa maupun di tingkat Pemerintahan.

Alat dan bahan :

1. Bahan Diskusi : Partisipasi Politik
2. Lembar respon peserta
3. Daftar hadir peserta
4. Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
1.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	4 Menit
2.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
3.	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta: Apa yang ada di pikiran masyarakat ketika mendengar kata Partisipasi Politik	5 Menit
4.	Presentasi materi Partisipasi Politik kepada masyarakat dampingan	13 Menit
5.	Diskusi masyarakat : 3 point pertanyaan	10 Menit
6.	Presentasi kelompok	15 Menit
7	Penutup : 34) Menyampaikan rangkuman atas presentasi kelompok atau peserta 35) Minta peserta mengisi lembar respon	10 Menit

	36) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang di capai serta keterlibatan seluruh peserta.	
	Total	60 Menit

Pelajari :

Partisipasi [politik](#) secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan

Partisipasi politik ini erat kaitannya dengan kegiatan politik di negara demokrasi. Keterlibatan rakyat dalam perpolitikan dianggap sebagai barometer utama dalam mengukur tingkatan implementasi demokrasi dari suatu negara. Dalam sistem politik demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk ikut menentukan siapa wakil mereka untuk duduk dalam jabatan penting kenegaraan.

Sebetulnya, partisipasi politik ini relevan untuk setiap sistem politik. Akan tetapi, hal ini paling dibutuhkan dalam sistem politik demokrasi. Ini lantaran dalam demokrasi, diasumsikan bahwa semakin sedikit rakyat yang terlibat atau mengambil bagian dalam keputusan, berarti semakin sedikit pula demokrasi yang dijalankan. Sebaliknya, semakin banyak partisipasi yang ada dalam keputusan, semakin banyak demokrasi di sana.

Dengan demikian, tingkat dan cakupan partisipasi politik ini merupakan kriteria yang penting, bahkan mungkin menentukan, dalam menilai kualitas demokrasi yang ada pada suatu negara.

Adapun contoh perilaku politik ini dapat meliputi :

1. Memberikan suara dalam pemilu untuk memilih wakil rakyat/ pemimpin,
2. Terlibat dalam kampanye,
3. melakukan demonstrasi,
4. menghadiri rapat umum partai,
5. memposting blog,
6. menjadi sukarelawan,
7. bergabung dengan massa,
8. menandatangani petisi,
9. membeli perdagangan produk yang dianggap adil,
10. Membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan, Melakukan diskusi publik,

11. Melakukan komunikasi pribadi dengan aktivis politik atau pejabat pemerintah,
12. Mengikuti partai politik atau parpol,
13. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas,
14. Berhak menjadi pimpinan politik

Partisipasi pemilih

1. Salah satu bentuk Partisipasi Politik dengan memberikan hak suara pada saat pemilihan

Arti Penting Partisipasi Pemilih pada Pilkada

1. Pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah
2. Momentum bagi warga negara di daerah untuk menentukan masa depan negara melalui daerahnya.
3. Jalan menuju demokrasi substansial
4. Mementum untuk menguatkan sinergitas daerah dengan pusat
5. Momentum keterlibatan warga pada kaderasi calon-calon pemimpin daerah dan nasional
6. Momentum bagi masyarakat daerah untuk mengontrol suksesi calon pemimpin di tingkat daerah dan jalannya pemerintahan daerah

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih

1. Faktor kepercayaan kepada pemerintah, elit politik dan parpol
2. Faktor kepercayaan terhadap hasil pilkada
3. Faktor peforma kandidat yang berkontestasi
4. Faktor profesionalitas penyelenggaraan pilkada
5. Faktor isu-isu yang berkembang atau dikembangkan
6. Faktor pemahaman dan kesadaran politik masyarakat
7. Faktor aktivitas politik kandidat dan pendukungnya
8. Faktor regulasi dan sistem pemilihan

INGAT :

1. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan
2. Setiap warga negara bebas menentukan pilihannya
3. Salah satu bentuk Partisipasi Politik dengan memberikan hak suara pada saat pemilihan

SOAL DISKUSI :

13. Apakah masyarakat desa sudah berpartisipasi pada kegiatan penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan yang ada di desa ?
14. Apa penyebab masyarakat masih enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di desa ?
15. Apakah masyarakat mengetahui bahwa partisipasi politik bukan hanya pada saat pemilu saja ?

Modul 3.7 Pengertian Politik Uang dan Penyebab Terjadinya Politik Uang

Tujuan :

1. Memberikan pemahaman tentang pengertian politik uang dan penyebab terjadinya politik uang
2. Mendorong masyarakat agar berkomitmen untuk menolak politik uang pada saat menjelang Pemilihan Legislatif dan Eksekutif di daerah maupun Nasional
3. Meningkatkan kesadaran peserta akan dampak negatif jika menerima politik uang pada saat pemilu

Alat dan bahan :

1. Bahan Diskusi : pengertian politik uang dan penyebab terjadinya politik uang
2. Lembar respon peserta
3. Daftar hadir peserta
4. Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
1.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	4 Menit
2.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
3.	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta: Apa yang ada di pikiran masyarakat ketika mendengar kata Politik uang	5 Menit
4.	Memberikan lembar materi dan atau Pemutaran filem sesuai dengan materi pengertian politik uang kepada kelompok atau peserta	13 Menit
5.	Diskusi masyarakat : 3 point pertanyaan	10 Menit
6.	Presentasi kelompok	15 Menit

7.	Penutup : 37) Menyampaikan rangkuman atas persentasi kelompok atau peserta 38) Minta peserta mengisi lembar respon 39) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang di capai serta keterlibatan seluruh peserta.	10 Menit
	Total	60 Menit

Pelajari :

Secara umum money politic biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan money politic sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik

Pemahaman tentang money politic sebagai tindakan membagi-bagi uang (entah berupa uang milik partai atau pribadi). Publik memahami money politic sebagai praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa (voters) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis (political again). Artinya tindakan money politic itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya.

Politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. Politik uang sebagai the mother of corruption adalah persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia (Aspinall & Sukmajati, 2015). Politik uang menjadi corong utama menciptakan seorang pemimpin yang pro terhadap kepentingan pribadi dan kelompok. Politik uang mengakibatkan biaya politik seorang pemimpin saat proses pemilihan menjadi mahal. Tentu ketika seorang kandidat yang terpilih dengan proses suap menyuap, akan berpikir bagaimana modal yang dikeluarkan kembali dan bukan berpikiran untuk kepentingan rakyat.

Rakyat yang menerima uang sebenarnya menggadaikan kedaulatannya untuk masa waktu tertentu. Jika kita menggadaikan kedaulatan kita kepada penguasa maka pada dasarnya kita tidak bisa mengklaim kedaulatan itu kembali. Setidaknya kita tidak punya hak untuk menuntut penguasa memberikan perhatian kepada kepentingan dan kebutuhan kita, karena kita sudah menerima imbalan atas legitimasi yang sudah kita berikan kepada mereka (penguasa).

Konsekuensinya, kita tidak berhak marah apabila mereka (penguasa) korupsi, atau menyalah gunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Akibat yang ditimbulkan akibat money politic sesungguhnya mengakibatkan hubungan antara rakyat dengan kuasa menjadi tidak seimbang, menjadi timpang dan menjadikan rakyat tidak berdaya terhadap penguasa. Ketidak seimbangan ini akan dipertahankan terus, karena menguntungkan penguasa dan merugikan rakyat.

A. Penyebab Terjadinya Politik Uang

1. Faktor Keterbatasan Ekonomi

Penyebab terjadinya politik uang tidak terlepas dari faktor keterbatasan ekonomi yang hingga saat ini selalu memunculkan masalah-masalah baru, termasuk membuka peluang bagi terjadinya politik uang di masyarakat. Artinya bahwa kemiskinan selama ini membuat masyarakat berfikir secara rasional untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, termasuk ketika menerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politisi dalam pemilu. Praktek politik uang tidak mudah untuk diceah dan diberhentikan jika keterbatasan ekonomi dan kemiskinan masih melanda masyarakat kita.

2. Faktor Rendahnya Pendidikan

Penyebab dari rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Tentunya hal ini tidak terlepas dari rendahnya faktor ekonomi yang membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sehingga hal ini mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku mereka ketika melakukan sesuatu. Rendahnya kualitas pendidikan ini pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah terhadap politik dan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Ketidaktahuan masyarakat ini mempengaruhi perilaku mereka dalam menyikapi praktek politik uang yang terjadi, hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat dalam menerima sejumlah imbalan yang diberikan, kemudian sangat mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk memilih calon atau kontestan politik, hingga adanya sikap pragmatis dalam diri masyarakat membuat mereka semakin memiliki ketidakpedulian terhadap pelanggaran yang terjadi, dan akhirnya berdampak pada rendahnya kesadaran politik hingga partisipasi politik yang masih sangat rendah.

4. Faktor Lemahnya Pengawasan Praktek politik uang

Lemahnya pengawasan praktek uang juga akan sulit untuk dihentikan jika kerja sama antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait masih kurang dalam melakukan pengawasan dari praktek politik uang, terutama mendekati hari pemilihan. Lemahnya pengawasan ini lebih menitikberatkan kepada adaptasi individu terhadap peraturan yang mengawasi praktek politik uang itu sendiri, dimana karena faktor rendahnya pendidikan juga berpengaruh kepada pola pikir masyarakat, sehingga belum mampu memahami dan menginternalisasi dengan baik terkait peraturan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya praktek politik uang di masyarakat.

Dampak Terjadinya Politik Uang Dampak yang ditimbulkan dari politik uang ini, merupakan dampak yang terjadi jangka panjang, artinya jika terus dibiarkan maka akan merugikan semua orang, tidak hanya merugikan masyarakat secara keseluruhan, bahkan dapat merugikan Negara dengan adanya berbagai permasalahan baru yang kemungkinan terjadi karena praktek politik uang ini. Dampak politik uang ini juga bisa merusak tatanan demokrasi dalam suatu Negara, sehingga jika terus dibiarkan akan menimbulkan berbagai permasalahan baru di masyarakat bahkan Negara dan dapat merusak mental generasi penerus yang akan membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang.

INGAT :

1. Setiap masyarakat berhak menentukan pilihannya pada saat pemilu berlangsung
2. Masyarakat yang menerima uang sebenarnya menggadaikan kedaulatannya untuk masa waktu tertentu
3. Akan banyak dampak negatif dan kerugian jika masyarakat masih menerima uang/suap dari calon pemimpin

SOAL DISKUSI :

1. Apakah masyarakat setuju terhadap praktek politik uang dalam pemilu ?
2. Apa alasan masyarakat sampai saat ini masih menerima uang pada saat pemilu berlangsung ?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap calon yang melakukan praktek politik uang ?

Modul 3.8. Pendidikan Kepemimpinan

Tujuan :

1. memberikan pemahaman tentang Pendidikan Kepemimpinan
2. Mendorong masyarakat agar mampu menjadi seorang pemimpin
3. Mendampingi masyarakat agar ikut terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa

Alat dan bahan :

1. Bahan Diskusi : Pendidikan Kepemimpinan
2. Lembar respon peserta
3. Daftar hadir peserta
4. Form Hasil Diskusi masyara

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
1.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	4 Menit
2.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
3	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta: Apa yang ada di pikiran masyarakat ketika mendengar kata Kepeminpinan	5 Menit
4.	Memberikan lembar materi dan atau Pemutaran filem sesuai dengan materi pengertian Kepemimpinan kepada kelompok atau peserta	13 Menit
5.	Diskusi masyarakat : 3 point pertanyaan	10 Menit
6.	Prententasi kelompok	15 Menit
7.	Penutup : 40) Menyampaikan rangkuman atas persentasi kelompok atau peserta 41) Minta peserta mengisi lembar respon 42) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang di capai serta keterlibatan seluruh peserta.	10 Menit
	Total	60 Menit

Pelajari :

Pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. (Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan)

Pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab, supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan. (Robert Tanenbaum)

Pemimpin pertama-tama harus seorang yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para bawahannya. Pemimpin yang baik untuk masa kini adalah orang yang religius, dalam artian menerima kepercayaan etnis dan moral dari berbagai agama secara kumulatif, kendatipun ia sendiri mungkin menolak ketentuan gaib dan ide ketuhanan yang berlainan. (Prof. Maccoby).

Pemimpin yang baik adalah seorang yang membantu mengembangkan orang lain, sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya itu.

Menurut Pancasila, Pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun, dan membimbing asuhannya. Dengan kata lain, beberapa asas utama dari kepemimpinan Pancasila adalah :

1. Ing Ngarsa Sung Tuladha : Pemimpin harus mampu dengan sifat dan perbuatannya menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan bagi orang - orang yang dipimpinnya.
2. Ing Madya Mangun Karsa : Pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang - orang yang dibimbingnya.
3. Tut Wuri Handayani : Pemimpin harus mampu mendorong orang - orang yang diasuhnya berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab.

B. Kaitannya dengan kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan pihak lainnya. Ketiga kata yaitu pemimpin, kepemimpinan serta kekuasaan yang dijelaskan sebelumnya tersebut memiliki keterikatan yang tak dapat dipisahkan. Karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lainnya, tetapi banyak faktor. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan, apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat - sifatnya, atau kewenangannya yang dimiliki yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan.

C. Apa yang harus dimiliki oleh seorang Pemimpin

Berdasarkan hasil penelitian, pemimpin yang mempunyai kecerdasan yang tinggi di atas kecerdasan rata - rata dari pengikutnya akan mempunyai kesempatan berhasil yang lebih tinggi pula. Karena pemimpin pada umumnya memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengikutnya.

1. Kedewasaan dan Keluasan Hubungan Sosial

Umumnya di dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternal, seorang pemimpin yang berhasil mempunyai emosi yang

matang dan stabil. Hal ini membuat pemimpin tidak mudah panik dan goyah dalam mempertahankan pendirian yang diyakini kebenarannya.

2. Motivasi Diri dan Dorongan Berprestasi

Seorang pemimpin yang berhasil umumnya memiliki motivasi diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi. Dorongan yang kuat ini kemudian tercermin pada kinerja yang optimal, efektif dan efisien.

3. Sikap Hubungan Kemanusiaan

Adanya pengakuan terhadap harga diri dan kehormatan sehingga para pengikutnya mampu berpihak kepadanya, sensitifitas terhadap isu-isu atau kondisi yang berkembang di kelompoknya

D. Karakteristik pribadi kepemimpinan rakyat:

1. Memiliki kecerdasan intelektual dan emosional serta spritual;
2. Memiliki kecakapan berkomunikasi;
3. Sensitif terhadap isu dan perubahan di kelompok/ masyarakatnya
4. Memiliki visi dan misi untuk mensejahterakan rakyatnya;
5. Melayani, bukan menunggu untuk dilayani;
6. Msengedepankan kepentingan rakyat daripada pribadi ataupun golongan.

INGAT :

4. Pemimpin yang baik adalah seorang yang membantu mengembangkan orang lain, sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya itu
5. Masyarakat mengetahui hal apa saja yang harus di miliki oleh seorang pemimpin
6. Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang baik
7. Seorang pemimpin yang berhasil umumnya memiliki motivasi diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi.

SOAL DISKUSI :

1. Menurut masyarakat apa itu pemimpin ?
2. Menurut masyarakat apa kendala untuk menjadi seorang pemimpin?
3. Apakah masyarakat khususnya kaum perempuan sudah berani menjadi seorang pemimpin ?

BAB 4

Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan

Modul 4.1. Gender

Tujuan :

1. Memberikan pendidikan kepada perempuan untuk mengetahui arti Gender
2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan mengenai kesetaraan gender

Alat dan bahan :

- 13) Bahan Diskusi : Perempuan
- 14) Lembar respon peserta
- 15) Daftar hadir peserta
- 16) Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
76.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	3 Menit
77.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
78.	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta : Apa yang ada di pikiran masyarakat mengenai Gender	5 Menit
79.	Memberikan lembar materi dan atau memutar film tentang Gender kepada kelompok atau peserta	18 Menit
80.	Diskusi masyarakat : 3 point pertanyaan	15 Menit
81.	Presentasi kelompok	10 Menit
82.	Penutup : 43) Menyampaikan rangkuman atas presentasi kelompok atau peserta 44) Minta peserta mengisi lembar respon 45) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta	6 Menit
	Total	60 Menit

Diskusi

Gender

Pelajari :

1. Gender dan Kodrat

Seks atau jenis kelamin adalah hal paling sering dikaitkan dengan Gender dan kodrat. Laki-laki memiliki penis dan buah zakar, mengalami mimpi basah, memproduksi sperma dan mengeluarkannya, sedangkan perempuan memiliki vagina, dapat mengandung, melahirkan dan menyusui, suatu keadaan biologis yang dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin dan secara kodrat mereka berbeda satu sama lain. Hal seperti ini yang disebut dengan kodrat. Gender berbeda dengan jenis kelamin, gender bukan jenis kelamin. Gender bukanlah perempuan ataupun laki-laki. Gender hanya memuat perbedaan fungsi dan peran sosial laki-laki dan perempuan, yang terbentuk oleh lingkungan tempat kita berada. Gender tercipta melalui proses sosial budaya yang panjang dalam suatu lingkup masyarakat tertentu, sehingga dapat berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya Dengan kata lain Gender adalah fungsi dan peran sosial laki-laki dan perempuan dalam lingkungan masyarakat. Selalu ada perbedaan Peran dan fungsi social laki-laki dan perempuan yang terbentuk oleh lingkungan di antara keduanya.

Pada umumnya masyarakat sering mencampuradukkan antara gender dan kodrat, hal ini dikarenakan perbedaan kodrat yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Masyarakat mulai memilah-milah peran sosial seperti apa yang (dianggap) pantas untuk laki-laki dan bagian mana yang (dianggap) sesuai untuk perempuan. Misalnya, hanya karena kodratnya perempuan mempunyai rahim dan bisa melahirkan anak, maka kemudian berkembang anggapan umum di masyarakat bahwa perempuanlah yang bertanggung jawab mengurus anak.

INGAT :

10. Perempuan memahami apa artinya kodrat
11. Perempuan memahami arti gender

12. Perempuan mampu membedakan kodrat dan gender
13. Perempuan memahami kesetaraan gender

SOAL DISKUSI :

10. Apakah bisa membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan kodrat?
11. Apakah perempuan mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian?
12. Mengapa laki-laki tidak mau membantu mengerjakan pekerjaan rumah?

Modul 4.2. Ketidakadilan Gender

Tujuan :

- 1 Memberikan pendidikan kepada perempuan untuk mengetahui arti Gender
- 2 Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan mengenai kesetaraan gender

Alat dan bahan :

- 1 Bahan Diskusi : Perempuan
- 2 Lembar respon peserta
- 3 Daftar hadir peserta
- 4 Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
1.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	3 Menit
2.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
3.	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta : Apa yang ada di pikiran masyarakat mengenai Gender	5 Menit
4.	Memberikan lembar materi dan atau memutarkan film tentang Gender kepada kelompok atau peserta	18 Menit
5.	Diskusi masyarakat : 3 point pertanyaan	15 Menit
6.	Presentasi kelompok	10 Menit
7.	Penutup : 1. Menyampaikan rangkuman atas presentasi kelompok atau peserta 2. Minta peserta mengisi lembar respon 3. Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta	6 Menit
	Total	60 Menit

Diskusi

Ketidakadilan Gender

Pelajari :

1. Ketidakadilan Gender

Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan atau yang lebih tinggi dikenal dengan perbedaan gender. Yang terjadi di masyarakat tidak

menjadi suatu permasalahan sepanjang perbedaan tersebut tidak mengakibatkan diskriminasi atau ketidakadilan. Patokan atau ukuran sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur apakah perbedaan gender itu menimbulkan ketidakadilan atau tidak adalah sebagai berikut:

2.1. Beban Ganda

Beban ganda (*double burden*) adalah beban perempuan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan kerumahtanggaan (*domestik*) dan pekerjaan-pekerjaan publik karena adanya pembagian kerja yang ketat antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Peran reproduksi misalnya, seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung-jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya, mereka mengalami beban yang berlipat ganda.

Di kalangan keluarga miskin, beban ganda harus ditanggung bagi perempuan yang ikut mencari nafkah, tetap harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, melayani suami, atau anggota keluarga yang lain dan merawat anak. Sehingga mengakibatkan jam kerja perempuan menjadi sangat panjang dan beban kerja berlebih. Hal ini jugalah yang memungkinkan mereka menjadi kurang istirahat, kelelahan, tidak ada waktu untuk mengurus diri sendiri, kekurangan waktu luang, kesulitan membagi waktu, tertekan dan mengalami gangguan hubungan dengan suami, anak atau anggota keluarga lainnya.

Kondisi di atas semakin diperparah dengan adanya anggapan bahwa pekerjaan domestik nilainya lebih rendah dari pekerjaan laki-laki, dan dianggap sebagai pekerjaan "tidak produktif" sehingga tidak diperhitungkan.

1.1. Marginalisasi

Marginalisasi adalah proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan baik secara sosial maupun ekonomi. Sesungguhnya banyak terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian, seperti penggusuran, bencana alam dan proses eksploitasi.

2.3. Stereotype

Stereotype adalah pelabelan/cap negatif terhadap jenis kelamin tertentu. Pada umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan

dari satu kelompok atas kelompok lainnya. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak/kelompok lain.

2.4. Sub Ordinasi

Sub-ordinasi artinya; suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain.

Sub-ordinasi (penomorduaan), anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, cengeng, dan lain sebagainya mengakibatkan perempuan jadi nomor dua setelah laki-laki. Sub-ordinasi bersumber pada masih kuatnya anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang irrasional dan emosional sehingga tidak mampu untuk memimpin dan harus selalu di bawah laki-laki.

INGAT :

- 1 Perempuan memahami apa artinya kodrat
- 2 Perempuan memahami arti gender
- 3 Perempuan mampu membedakan kodrat dan gender
- 4 Perempuan memahami kesetaraan gender

SOAL DISKUSI :

- 1 Apakah perempuan mau berbagi peran dalam pekerjaan rumah?
- 2 Apakah perempuan mau mendidik anak laki-laki untuk mengerjakan pekerjaan rumah?
- 3 Apakah perempuan membedakan peran anak laki-laki dan perempuan di rumah?

Modul 4.3. Gender dalam Budaya Patriarki

Tujuan :

- 1 Memberikan pendidikan kepada perempuan untuk memahami kesetaraan gender dalam budaya patriarki
- 2 Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan mengenai kesetaraan gender

Alat dan bahan :

- 1 Bahan Diskusi : Perempuan
- 2 Lembar respon peserta
- 3 Daftar hadir peserta
- 4 Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
1.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	3 Menit
2.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
3.	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta : Apa yang ada di pikiran masyarakat mengenai Kesetaraan gender di Budaya Patriarki	5 Menit
4.	Memberikan lembar materi dan atau memutarkan film tentang kesetaraan gender di budaya patriarki kepada kelompok atau peserta	18 Menit
5.	Diskusi masyarakat : 3 point pertanyaan	15 Menit
6.	Presentasi kelompok	10 Menit
7.	Penutup : 1. Menyampaikan rangkuman atas presentasi kelompok atau peserta 2. Minta peserta mengisi lembar respon 3. Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta	6 Menit
	Total	60 Menit

Diskusi

Kesetaraan Gender di Budaya Patriarki

Pelajari :

Tidak sedikit orang yang masih berpikir bahwa membicarakan kesetaraan Gender adalah sesuatu yang mengada-ada atau hal yang terlalu dibesar-besarkan. Kelompok orang yang berpikir konservatif seperti ini menganggap bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki dalam keluarga maupun dalam masyarakat memang harus berbeda. 'Perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, percuma menghabiskan biaya saja, toh nantinya akan kembali masuk dapur juga', Dari ungkapan tersebut mencerminkan tidak adanya kesetaraan Gender yaitu:

- Perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi dirinya dan lingkungannya
- Laki-laki tidak diberikan penghargaan yang sama dengan perempuan jika mereka memilih 'masuk dapur'.

Pemikiran seperti ini umumnya muncul terutama pada kelompok masyarakat tradisional-patriarkhi yang masih menganggap bahwa sudah kodratnya perempuan untuk melakukan pekerjaan di dapur. Peran Gender tidak sama dengan kodrat, bukan kodratnya perempuan untuk masuk dapur, karena kegiatan memasak di dapur tidak ada kaitannya dengan ciri-ciri biologis yang ada pada perempuan. Kegiatan memasak di dapur (atau kegiatan domestik lainnya) adalah suatu bentuk pilihan pekerjaan dari sekian banyak jenis pekerjaan yang tersedia (misalnya guru, dokter, pilot, supir, montir, pedagang, dll), yang tentu saja boleh dipilih oleh perempuan ataupun laki-laki. Kesetaraan Gender memberikan pilihan, peluang dan kesempatan tersebut sama besarnya pada perempuan dan laki-laki.

Kesetaraan Gender bukan berarti memindahkan semua pekerjaan laki-laki ke pundak perempuan, bukan pula mengambil alih tugas dan kewajiban seorang suami oleh istrinya. Jika hal ini yang terjadi, bukan 'kesetaraan' yang tercipta melainkan penambahan beban dan penderitaan pada perempuan. Inti dari kesetaraan Gender adalah menganggap semua orang pada kedudukan yang sama dan sejajar (equality), baik itu laki-laki maupun perempuan.

INGAT :

- 1 Perempuan memahami apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender
- 2 Perempuan mengerti kesetaraan gender dalam budaya patriarki

SOAL DISKUSI :

1. Bagaimana pandangan perempuan terhadap kesetaraan gender dalam budaya karo?
2. Apakah perempuan karo sudah mendapatkan kesetaraan gender di daerahnya?
3. Apakah perempuan karo berbagi tugas rumah tangga dengan pasangannya?

Modul 4.4. Diskriminasi Perempuan Karo

Tujuan :

1. Memberikan pendidikan kepada perempuan untuk memahami diskriminasi yang terjadi pada Perempuan Karo
2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan mengenai diskriminasi yang terjadi pada perempuan karo

Alat dan bahan :

1. Bahan Diskusi : Perempuan
2. Lembar respon peserta
3. Daftar hadir peserta
4. Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
1.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	3 Menit
2.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
3.	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta : Apa yang ada di pikiran masyarakat mengenai diskriminasi/ketidakadilan perempuan karo	5 Menit
4.	Memberikan lembar materi dan atau memutar film tentang perempuan karo dan diskriminasi kepada kelompok atau peserta	18 Menit
5.	Diskusi masyarakat : 3 point pertanyaan	15 Menit
6.	Presentasi kelompok	10 Menit
7.	Penutup : 1. Menyampaikan rangkuman atas presentasi kelompok atau peserta 2. Minta peserta mengisi lembar respon 3. Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta	6 Menit
	Total	60 Menit

Diskusi

Perempuan Karo dan Diskriminasi

Pelajari :

Perempuan Karo adalah perempuan yang pekerja keras, apapun ia lakukan demi keluarga dan anak-anaknya. Perempuan Karo mempunyai tanggung jawab yang besar didalam keluarga, baik di keluarga mertuanya maupun di keluarga orang tuanya. keterpinggiran perempuan tergambar jelas apabila ia tidak mampu memberikan keturunan anak laki-laki, karena anak laki-laki merupakan pembawa status sosial.

Perempuan Karo tergambar sebagai perempuan pekerja keras yang memperjuangkan agar orang-orang yang ia kasih mendapat yang terbaik di dalam kehidupannya, tanpa memperhitungkan pengorbanan baik moral maupun materil. Gambaran potret ketidakadilan gender pada perempuan Karo, seorang ibu yang baik itu pasti memperjuangkan segala bentuk apapun demi memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya agar dapat bersekolah kejenjang yang lebih baik serta juga harus mampu merias diri untuk memberi pelayanan yang terbaik bagi suami. Pengorbanan inilah yang akan mengangkat status sosial keluarga ketika anak-anak yang mereka perjuangkan berhasil.

Ketidakadilan pada perempuan Karo dapat terlihat jelas salah satunya pada saat adat berlangsung kaum perempuan tidak boleh ikut campur dalam musyawarah, mereka hanya sebagai pendengar dan mengiakan keputusan yang diambil. Di keluarga mertua, perempuan Karo kedudukannya sebagai *Kalimbubu*, di keluarga orang tuanya perempuan Karo posisinya sebagai *anak beru*. Perempuan dianggap tidak layak berbicara didalam adat di posisi *anak beru si ngerana*. Perempuan Karo sangat berperan menopang kehidupan perekonomian didalam keluarga, pada saat jam kerja mereka melaksanakan tugasnya di ladang sementara kaum laki laki menghabiskan waktunya duduk santai di kedai kopi sambil bermain catur, tanpa ada rasa prihatin melihat istri mereka yang banting tulang di bawah terik matahari mengerjakan lahan pertanian mereka. Kedudukan anak perempuan juga sangat diskriminasi karena anak perempuan pada perempuan Karo tidak boleh keluar dari

kampung apabila mereka belum menikah. Untuk melanjutkan pendidikan keluar kotapun orang tua mereka tidak mengizinkan, karena kekhawatiran orang tua terkadang sangat berlebihan. Tetapi untuk anak laki laki lebih diprioritaskan apalagi disaat panen Kaum laki-laki turut serta ke ladang apabila tanaman pertanian mereka ada yang panen.

INGAT :

1. Perempuan memahami apa yang dimaksud dengan diskriminasi
2. Perempuan mengerti apa yang menjadi hak dan kewajibannya

SOAL DISKUSI :

1. Apakah perempuan mengalami beban pekerjaan yang lebih besar di bandingkan dengan laki-laki?
2. Apakah perempuan dan laki-laki berbagi tanggung jawab?
3. Apakah perempuan mendapat perlakuan nomor dua?

Modul 4.5. Kekerasan Terhadap Perempuan

Tujuan :

1. Memberikan pendidikan kepada perempuan untuk mengetahui jenis-jenis kekerasan
2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan mengenai kekerasan terhadap perempuan

Alat dan bahan :

1. Bahan Diskusi : Perempuan
2. Lembar respon peserta
3. Daftar hadir peserta
4. Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
1.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	3 Menit
2.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
3.	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta : Apa yang ada di pikiran masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan	5 Menit
4.	Memberikan lembar materi dan atau memutar film tentang kekerasan terhadap perempuan kepada kelompok atau peserta	18 Menit
5.	Diskusi masyarakat : 5 point pertanyaan	15 Menit
6.	Presentasi kelompok	10 Menit
7.	Penutup : 1. Menyampaikan rangkuman atas presentasi kelompok atau peserta 2. Minta peserta mengisi lembar respon 3. Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta	6 Menit
	Total	60 Menit

Diskusi

Kekerasan Terhadap Perempuan

Pelajari :

Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan Perempuan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap wanita secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

1. **KEKERASAN FISIK** : tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. segala tindakan yang menyasar atau ditujukan untuk menyakiti tubuh atau fisik perempuan, misalnya: memukul, menampar, menendang, mencekik dan lain sebagainya.
2. **KEKERASAN PSIKHIS** : Tindakan yang menyasar atau ditujukan untuk menyakiti psikis perempuan, misalnya: memaki, menghina dan sebagainya.
3. **KEKERASAN SEKSUAL** : tindakan yang menyasar atau ditujukan untuk menyakiti atau merusak organ-organ seksual perempuan ataupun mengarah pada penghinaan seksualitas perempuan.
4. **KEKERASAN EKONOMI** :Kekerasan ekonomi disebut juga dengan penelantaran ekonomi yang berarti segala tindakan yang ditujukan untuk membatasi, mengurangi atau mengabaikan hak-hak perempuan atas penikmatan ekonomi atau sumber ekonominya.Kekerasan ekonomi di bagi dalam dua kategori yaitu:
 - *Kekerasan Ekonomi Berat*, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:
 1. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
 2. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
 3. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

- *Kekerasan Ekonomi Ringan*, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

INGAT :

1. Perempuan memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan
2. Perempuan mengerti jenis-jenis kekerasan
3. Perempuan mampu mengkategorikan kekerasan yang ada

SOAL DISKUSI :

1. Apakah perempuan mengalami kekerasan?
2. Siapa yang melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan?
3. Bagaimana upaya perempuan untuk menghindari kekerasan?
4. Bagaimana pandangan perempuan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan?
5. Bagaimana upaya pemerintahan jika terjadi kekerasan terhadap perempuan?

Modul 4.6. Kepemimpinan Perempuan

Tujuan :

1. Memberikan pendidikan kepada perempuan untuk memahami kepemimpinan perempuan
2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan mengenai kepemimpinan perempuan
3. Menciptakan pemimpin perempuan

Alat dan bahan :

1. Bahan Diskusi : Perempuan
2. Lembar respon peserta
3. Daftar hadir peserta
4. Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
1.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	3 Menit
2.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
3.	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta : Apa yang ada di pikiran masyarakat mengenai kepemimpinan perempuan	5 Menit
4.	Memberikan lembar materi dan atau memutarkan film tentang kepemimpinan perempuan kepada kelompok atau peserta	18 Menit
5.	Diskusi masyarakat : 3 point pertanyaan	15 Menit
6.	Presentasi kelompok	10 Menit
7.	Penutup : 1. Menyampaikan rangkuman atas presentasi kelompok atau peserta 2. Minta peserta mengisi lembar respon 3. Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta	6 Menit
	Total	60 Menit

Diskusi

Kepemimpinan Perempuan

Pelajari :

RA Kartini merupakan teladan penting bagi perempuan Indonesia. Beliau adalah tokoh yang memperjuangkan hak-hak perempuan seperti hak untuk belajar di sekolah dan hak untuk memimpin sebuah organisasi. Dengan demikian, seorang wanita memiliki sifat demokratis dan rasa kepedulian yang tinggi sehingga sosok wanita pun berkompeten untuk menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi. Saat ini, peran perempuan telah bergeser ke dimensi yang lebih luas. Kebangkitan kaum perempuan dalam era globalisasi telah membawa perubahan: perempuan bukan lagi semata-mata sebagai istri atau ibu, tetapi telah terorientasi pada kualitas eksistensinya selaku manusia. Jumlah perempuan mencapai separuh penduduk duni, sehingga secara demokratis pendapat dari perempuan harus dipertimbangkan. Selain itu, partisipasi perempuan diharapkan dapat mencegah kondisi yang tidak menguntungkan bagi kaum perempuan dalam menghadapi masalah stereotip terhadap perempuan, diskriminasi di bidang hukum, kehidupan sosial dan juga eksploitasi terhadap perempuan. Untuk menjadi seorang pemimpin tidak saja dibutuhkan bakat, tetapi juga dibutuhkan kemampuan dan keahlian yang dilatih sejak muda. Perempuan harus berjiwa pemimpin, antara lain: visioner, partisipatif, berkarakter, cerdas secara spiritual, emosional, sosial, maupun intelektual. Juga adanya *passion* kompetitif. Perempuan harus mampu membangun personal branding/citra diri yang positif, baik sebagai individu, ibu, mitra suami, sebagai pemimpin atau pelayan masyarakat. Perempuan harus memahami konsep diri yaitu, kesadaran, sikap, dan pemahaman, tentang siapa diri kita, apa cita-cita kita, apa kekurangan, kelebihan, kemampuan, dan kekuatan.

Perempuan pemimpin harus memiliki konsep diri positif, yakin akan kemampuan mengatasi masalah. Merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, sadar setiap keinginan dan perilaku tidak selalu disetujui masyarakat, dan mampu memperbaiki diri. Konsep diri bukan sesuatu yang tiba-tiba "jadi" tetapi harus dibentuk, dengan belajar. Seorang perempuan pemimpin harus

memiliki sikap asertif, yaitu penuh percaya diri, mempunyai keyakinan yang kuat akan tindakannya dan mampu menyatakan perasaan dan pendapatnya, tanpa menyakiti perasaan diri-sendiri atau perasaan orang lain, tanpa mengganggu hak orang lain.

INGAT :

1. Perempuan memahami apa yang dimaksud dengan kepemimpinan perempuan
2. Perempuan mampu menjadi seorang pemimpin

SOAL DISKUSI :

1. Apakah perempuan bisa menjadi seorang kepala desa?
2. Apa kendala perempuan menjadi seorang pemimpin?
3. Bagaimana tanggapan perempuan melihat seorang pemimpin perempuan?

Modul 4.7. Kepemimpinan Perempuan Karo

Tujuan :

3. Memberikan pendidikan kepada perempuan karo untuk memahami kepemimpinan perempuan
4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan karo mengenai kepemimpinan perempuan
5. Menciptakan pemimpin perempuan karo

Alat dan bahan :

- 17) Bahan Diskusi : Perempuan
- 18) Lembar respon peserta
- 19) Daftar hadir peserta
- 20) Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
83.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	3 Menit
84.	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 Menit
85.	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta : Apa yang ada di pikiran masyarakat mengenai kepemimpinan perempuan karo	5 Menit
86.	Memberikan lembar materi dan atau memutarkan film tentang kepemimpinan perempuan karo kepada kelompok atau peserta	18 Menit
87.	Diskusi masyarakat : 3 point pertanyaan	15 Menit
88.	Presentasi kelompok	10 Menit
89.	Penutup : 46) Menyampaikan rangkuman atas presentasi kelompok atau peserta 47) Minta peserta mengisi lembar respon 48) Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta	6 Menit
	Total	60 Menit

Diskusi

Kepemimpinan Perempuan Karo

Pelajari :

Peran perempuan yang berkembang di masyarakat baik dari aspek reproduksi, ekonomi, sosial, politik dan kepemimpinan bahwa selama ini perempuan ditempatkan hanya sebagai anggota dalam hal kegiatan kemasyarakatan atau keorganisasian. Hal ini dilihat dari perempuan yang aktif diorganisasi kemasyarakatan serta tidak memiliki ciri-ciri pemberani seperti halnya dengan laki-laki. Alasan inilah sehingga program kerja yang diusulkan perempuan tidak begitu banyak untuk diterima dan implementasikan ke dunia politik yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam perannya di masyarakat tidak lain faktor pendidikan sangat besar dan sangat menentukan keaktifan kaum perempuan dalam keterlibatannya sebagai pengurus dalam kegiatan organisasi dan kemasyarakatan, karena semua tugas-tugas yang diembankan kepada perempuan dapat dilaksanakan berkat adanya pendidikan yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Ini berarti bahwa ada relevansi antara tugas dengan pendidikan.

Kendala yang dialami perempuan dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan yaitu melalui beberapa persoalan antara lain pendidikan, pekerjaan, keadilan dan kesetaraan gender, peran domestik, budaya patriarki, agama dan hubungan kekeluargaan. Semua yang tercatat ini adalah masalah yang sering dihadapi perempuan dalam aspek kehidupan di masyarakat. Sehingga terkesan bahwa selama ini banyak perempuan yang tidak mau terlibat dengan persoalan partai, dan kemudian kendala lain yang sering terjadi di beberapa partai yaitu terjadinya diskriminasi terhadap perempuan bahkan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam kegiatan kemasyarakatan. Perempuan yang memiliki keahlian atau kompetensi memimpin negara, boleh menjadi kepala negara dalam konteks masyarakat modern karena sistem pemerintahan modern tidak sama dengan sistem monarki yang berlaku di masa klasik dimana kepala negara harus mengendalikan semua urusan kenegaraan.

Masyarakat Karo pada umumnya mengenal tiga macam kepemimpinan. Kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan di bidang Agama, Pemerintahan, dan Adat. Dalam bidang Agama, pada umumnya perempuan sudah disetarakan dengan laki-laki, hal ini dapat terlihat dari semakin banyak perempuan yang menjadi pendeta yang merupakan pimpinan dari sebuah gereja, meskipun masih ada beberapa daerah yang lebih memilih pimpinan gereja seorang laki-laki. Dalam bidang pemerintahan, perempuan juga sudah mulai mendapatkan peran hal ini terbukti dari telah terpilihnya beberapa kepala desa perempuan, beberapa perempuan juga sudah menduduki jabatan sebagai anggota DPRD meskipun masih sedikit, dan untuk pertama sekali dalam pemerintahan Kabupaten Karo telah terpilih Bupati Perempuan. Dalam bidang adat, perempuan belum mendapatkan kesetaraan dengan laki-laki, hal ini terbukti dari setiap ada kegiatan musyawarah adat (runggu) perempuan tidak diperbolehkan mengeluarkan pendapat, duduk di posisi belakang dan hanya

mengiyakan setiap keputusan yang dibuat oleh kaum laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan tidak memiliki keberanian untuk mengutarakan pendapat dan menyuarakan kebutuhan mereka.

INGAT :

1. Perempuan memahami apa yang dimaksud dengan kepemimpinan perempuan
2. Perempuan mampu menjadi seorang pemimpin

SOAL DISKUSI :

1. Apakah perempuan bisa mengutarakan pendapat pada waktu musyawarah desa?
2. Apa kendala perempuan tidak memberikan pendapat pada musyawarah?
3. Mengapa pada musyawarah adat karo, perempuan selalu duduk di belakang?

BAB. 5

Pendidikan Kesadaran HIV-AIDS Dan Narkoba

Modul 5.1 HIV DAN AIDS

Tujuan :

Memberikan pemahaman yang benar tentang HIV dan AIDS yang benar kepada anggota OR sehingga berani untuk memberikan pemahaman yang benar kepada orang lain

Alat dan bahan:

01. Kertas isian form hasil diskusi untuk peserta
02. Daftar hadir peserta

Waktu : 60 menit

No	Kegiatan	Waktu
01	Menyapa masyarakat dan pengurus OR	3 menit
02	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 menit
03	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta " Bagaimana pemahaman anggota OR ketika mendengar kata HIV dan AIDS"	4 menit
04	Memberikan lembar materi dan atau pemutaran film tentang HIV dan AIDS kepada kelompok/peserta	17 menit
05	Diskusi kelompok OR : 4 point pertanyaan	15 menit
06	Presentase kelompok	10 menit
07	Penutup : 03. Menyampaikan rangkuman atas presentase kelompok/peserta 04. Meminta kembali kepada peserta untuk memberikan respon atas diskusi tersebut 05. Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta.	8 menit
	Jumlah	60 menit

Diskusi

HIV DAN AIDS

Pengertian HIV DAN AIDS

HIV dan AIDS merupakan dua hal yang berbeda, HIV adalah : Virus yang menyerang system kekebalan tubuh, sedangkan AIDS adalah : kumpulan penyakit akibat virus HIV yang sudah melemahkan daya tahan tubuh. Imun yang dikenal dengan CD4 menurun drastis dan membuat tubuh kita tidak dapat melawan infeksi. AIDS adalah dampak jangka panjang dari infeksi HIV. AIDS merupakan penyakit kronis yang disebabkan adanya infeksi HIV. Tidak semua pengidap infeksi HIV akan mengalami penyakit AIDS, namun seseorang yang terkena AIDS sudah pasti mengalami infeksi HIV. Namun setiap orang yang sudah terpapar HIV dan AIDS harus secara rutin melakukan terapi ARV seumur hidup untuk menekan perkembangan virus.

HIV (human immunodeficiency virus) adalah : virus yang merusak/menyerang system kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 sehingga kekebalan tubuh akan semakin melemah/menurun dan rentan diserang berbagai penyakit. Sel CD4 adalah jenis sel darah putih yang bertugas secara spesifik untuk melawan infeksi oleh berbagai macam bakteri, virus, jamur dan sebagainya. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang serius yang disebut AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV sehingga ketika seseorang masuk kedalam taraf AIDS berbagai penyakit akan lebih mudah masuk kedalam tubuh karena kekebalan tubuh menurun. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS, akan tetapi ada obat untuk memperlambat perkembangan virus yaitu dengan melakukan terapi Antiretroviral. AIDS diartikan sebagai kumpulan berbagai gejala penyakit akibat menurunnya system kekebalan tubuh karena virus HIV dan bukan karena keturunan/kutukan tetapi karena didapat. lajari.

HIV Dan AIDS itu sangat perlu diwaspadai karena sangat cepat mendunia dan seperti fenomena gunung es artinya dalam 10 orang yang di lakukan test maka 1 orang ditemukan positif (menurut WHO 10 : 1). Sampai saat ini belum ada obat yang mampu untuk menyembuhkan tetapi hanya ada obat yang berfungsi untuk memperlambat/menekan perkembangan virus yaitu dengan melakukan terapi secara rutin dengan mengkonsumsi antiretroviral (ARV). Penularan virus HIV juga tidak melalui media yang sembarangan tetapi harus melalui kontak darah yang langsung sebab virus tidak akan mampu hidup diluar tubuh manusia yang hidup

Kesimpulan

01. Seseorang yang terpapar virus HIV dan AIDS bukanlah karena kejahatan
02. Odha (orang dengan hiv/aids) tidak menunggu kematian
03. Odha (orang dengan hiv/aids) harus mengkonsumsi obat seumur hidup
04. Virus HIV tidak gampang menular tetapi harus melalui media yang kontak darah secara langsung

Soal Diskusi

01. Mengapa ada pemikiran masyarakat bahwa ketika seseorang terpapar virus HIV akan meninggal cepat?
02. Bagaimana respon/tindakan kita ketika mendengar ada keluarga/masyarakat yang terpapar virus Hiv?
03. Apakah masyarakat mengerti proses proses yang dilakukan ketika ada keluarga yang terpapar Hiv?
04. Bagaimana gejala orang yang sudah terpapar viru HIV?

Modul 5.2 Stigma Dan Diskriminasi

Tujuan : Memberikan pemahaman kepada peserta arti stigma dan diskriminasi sehingga mengurangi beban bagi Odha dan Ohidha

Alat dan bahan:

- Kertas isian form hasil diskusi untuk peserta
- Daftar hadir peserta

Waktu : 60 menit

No	Kegiatan	Waktu
01	Menyapa masyarakat dan pengurus OR	3 menit
02	Melihat daftar kehadiran peserta	3 menit
03	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta " Bagaimana pemahaman anggota OR ketika mendengar kata Stigma dan Diskriminasi"	5 menit
04	Memberikan lembar materi dan atau pemutaran film tentang " stigma dan diskriminasi" kepada kelompok/peserta	17 menit
05	Diskusi untuk peserta : 3 point pertanyaan	14 menit
06	Presentase kelompok	10 menit
07	Penutup : 01. Menyampaikan rangkuman atas presentase kelompok/peserta 02. Meminta kembali kepada peserta untuk memberikan respon atas diskusi tersebut 03. Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keteribatan seluruh peserta	8 menit
	Total	60 menit

Diskusi

STIGMA DAN DISKRIMINASI

Pengertian stigma dan diskriminasi

Stigma adalah : ciri negative yang menempel pada pribadi seseorang atau label negative yang diberikan pada orang yang terpapar HIV dan AIDS.

Diskriminasi adalah : tindakan yang menucilkan, pembedaan perlakuan terhadap seseorang yang artinya merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu. Diskriminasi biasanya disebabkan karena kecendrungan manusia untuk membeda bedakan. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena suku, agama, ekonomi dan sebagainya adalah merupakan dasar dari tindakan diskriminasi.

Stigma dan diskriminasi telah menjadi hukuman social oleh masyarakat terhadap orang yang terpapar HIV dan Aids yang bermacam macam bentuknya misalnya : pengasingan, penolakan dan penhindaran . Sehingga membuat orang enggan untuk melakukan test HIV serta cenderung untuk menyembunyikan status dirinya ketika positif. Hal ini semakin memperburuk keadaan, yang tadinya dapat dikendalikan akhirnya membuat penyakit ini makin meluas penyebarannya secara terselubung. Stigma dan diskriminasi terhadap Odha merupakan tantangan dan potensial menjadi penghambat upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Oleh sebab itu sangat diperlukan pemberdayaan kelompok dukungan sebaya (KDS) untuk mengurangi stigma dan diskriminasi.

Tekanan stigma dan diskriminasi sangat tinggi pada Odha dan Ohidha sekitar tahun 2011 karena pemahaman masyarakat yang sangat rendah dan kurangnya pendidikan dan pengarahan yang mereka terima. Satu hal yang sangat mereka takutkan adalah karena belum ada " OBAT" untuk menyembuhkan dan setiap odha yang meninggal dianggap karena virus yang mematikan, padahal odha meninggal karena komplikasi berbagai penyakit. Bukan hanya odha yang diasingkan tetapi keluarga odha juga karena dianggap penyakit kutukan atau karena perlakuan yang jahat, walaupun ada juga yang terpapar karena kejahatan tetapi tidak semua yang terpapar karena kejahatannya.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan semakin banyak lembaga yang terlibat memberikan edukasi maka saat ini sudah ada pergeseran pola pikir masyarakat. Ketika ada yang terpapar maka tidak ada lagi pengucilan sebab masyarakat sudah paham penularan, ciri ciri Odha. Tapi dari sisi lain sampai saat ini Odha belum berani membuka diri (open status) sehingga pemerintahan ditingkat desa belum mengalokasikan anggaran untuk membantu Odha termasuk pengadaan vitamin dan BPJS PBI yang sangat membantu Odha setiap bulan untuk mendapatkan terapi Antiretroviral (ARV).

Kesimpulan

01. Upaya menghapus stigma dan diskriminasi merupakan hal yang penting karena hal ini akan dapat menekan laju peningkatan kasus HIV&AIDS.
02. Dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah adalah salah satu bentuk solidaritas terhadap odha dan ohidha.
03. Odha juga berhak untuk berumah tangga dan mempunyai keturunan tanpa terpapar virus .

Soal dan Diskusi

01. Mengapa ada odha yang diasingkan (memisahkan keperluan dengan keluarga)?
02. Apakah odha dapat hidup normal selayaknya seperti orang yang belum terpapar virus hiv?
03. Apakah yang dimaksud dengan odha dan ohidha
04. Mengapa dilakukan stigma dan diskriminasi kepada odha?

Modul 5.3. Bahaya Narkoba

Tujuan : Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada peserta bahwa narkoba itu adalah obat yang terlarang dan akan menciptakan ketergantungan yang akan berakhir pada kematian.

Alat dan bahan:

- Kertas isian form hasil diskusi untuk peserta
- Daftar hadir peserta

Waktu : 60 menit

No	Kegiatan	Waktu
01	Menyapa masyarakat dan pengurus OR	3 menit
02	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 menit
03	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta “ Bagaimana pemahaman anggota OR ketika mendengar kata Bahaya narkoba	5 menit
04	Memberikan lembar materi dan atau pemutaran film tentang “kesadaran bahaya narkoba” kepada masyarakat dampingan	17 menit
05	Diskusi masyarakat : 4 point	14 menit

06	Presentase kelompok	10 menit
07	Penutup 01.Menyampaikan rangkuman atas presentase kelompok/peserta 02. Meminta kembali kepada peserta untuk memberikan respon atas diskusi tersebut 03.Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta	8 menit
	Total	60 menit

Diskusi

Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika,, psikotropika dan obat terlarang yang menimbulkan efek penurunan kesadaran,halusinasi, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No.35 tahun 2009).Narkoba hanya digunakan dikalangan medis yaitu ketika melakukan oprasi pada pasien untuk menghilangkan rasa sakit, juga dilapangan dikonsumsi oleh orang yang menderita cancer yang pada stadium 4 (mengurangi ras sakit).Pengertian Narkoba

Pengguna narkoba suntik (Penasun) merupakan kelompok yang rentan dan sangat beresiko terhadap HIV dan AIDS karena perilaku berbagi peralatan suntik narkoba secara bergantian menyebabkan penularan virus Hiv dan Aids lebih tinggi dibandingkan dengan cara penularan yang lain. Sebab pada jarum suntik yang digunakan terdapat darah dan darah tersebut tinggal dalam insulin sehingga lebih mudah untuk menulrkan virus karena darah yang terinfeksi langsung dimasukkan pada aliran darah orang lain. Untuk mengurangi resiko penularan HIV jangan memakai alat suntik apapun secara bergantian, hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak buruk (harm reduction) pengguna narkoba.

Secara umum penyalahgunaan narkoba dapat memberi efek yang sangat kurang baik misalnya : irama/detak jantung tidak teratur,dapat mengakibatkan serangan jantung,sering lupa ingatan, malas mandi. Kalau keseharian kita lihat pecandu kebiasaan buruk suka mencuri,dan mau mengancam keluarga ketika tidak ada uang untuk membeli narkoba.

Sebenarnya dilingkungan tempat kita tinggal ada jenis jenis narkoba yang tidak kita ketahui mislanya : bunga kecubung yang daunnya dimasak dan diperas airnya untuk dikonsumsi oleh pecandu atau bunga terompet yang berwarna putih dimana sari yang didalam bunganya atau air perasan dari daunnya juga sering digunakan para pecandu ketika tidak mempunyai uang.

Kesimpulan

01. Pengguna narkoba dapat berhenti total (hidup normal) ketika ada kesadaran dari dirinya sendiri dan ada dukungan yang kuat dari keluarga (orang terdekat)
02. Dampak buruk narkoba tidak hanya bagi pengguna saja tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat dimana dia tinggal .

Soal dan Diskusi

01. Sebutkan ciri ciri orang yang sudah pemakai narkoba
02. Sebutkan jenis tanaman yang sejenis narkoba yang ada disekitar kita
03. Bagaimana mengatasi ketika ada keluarga yang pecandu narkoba
04. Apakah yang dimaksud dengan narkoba dan jenis jenis narkoba

4.3 Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) dan Odha/Ohidha

Modul : Kelompok Dukungan Sebaya

Tujuan : Memberikan pemahaman kepada peserta bahwa group kelompok dukungan sebaya adalah wadah untuk membangun kepercayaan sesama Odha (Orang dengan HIV/IDS)

Alat dan bahan:

- Kertas isianform hasil diskusi untuk peserta
- Daftar hadir peserta

Waktu : 60 menit

No	Kegiatan	Waktu
01	Menyapa masyarakat dan pengurus OR	3 menit
02	Melihat daftar kehadiran anggota	3 menit
03	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta “ Bagaimana pemahaman anggota OR ketika mendengar tentang” Kelompok Dukungan Sebaya /KDS”	5 menit
04	Memberikan lembar materi dan atau pemutaran film kepada masyarakat dampingan tentang “ KDS (Kelompok Dukungan Sebaya)	17 menit
05	Diskusi : 3 point pertanyaan	14 menit
06	Presentase kelompok	10 menit
07	Penutup 01.Menyampaikan rangkuman atas presentase kelompok/peserta	8 menit

	02. Meminta kembali kepada peserta untuk memberikan respon atas diskusi tersebut 03. Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta	
	Total	60 menit

Diskusi

Kelompok Dukungan Sebaya dan Odha

Pengertian KDS dan Odha/Ohidha

KDS adalah kelompok dukungan sebaya (peer support group) yang terdiri dari orang-orang yang sepenanggungan / meliputi orang-orang yang menghadapi tantangan yang sama artinya yang tergabung dalam group tersebut adalah orang-orang yang sudah terpapar virus HIV. KDS menjadi satu wadah untuk saling berbagi dan menguatkan satu sama lain. Dengan adanya wadah tersebut mereka saling terbuka karena merasa senasib dan akan sering dilakukan pertemuan-pertemuan untuk berbagi bagaimana menjaga pola hidup sehat, keteraturan dalam mengkonsumsi antiretroviral dan membuka wawasan untuk mendapatkan layanan.

Secara umum odha sangat menutup diri sehingga sering dilupakan ditingkat desa tentang haknya dalam musrenbang, misalnya penambahan vitamin, hal ini terjadi karena mereka tidak open status. Ketidakterbukaan odha karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hiv dan adanya stigma/cap negative. Jadi hak mereka menjadi terpinggirkan bukan karena pemerintah desa kurang peduli walaupun disisi lain ada odha yang terbuka tetapi tetap tidak diperhitungkan karena dianggap virus itu mereka dapat kejahatannya walaupun disatu sisi memang ada juga karena perbuatan mereka sendiri.

Kesimpulan

01. Kelompok dukungan sebaya (KDS) adalah wadah untuk berbagi sesama odha untuk saling mendukung dan menguatkan
02. Keanggotaan dari kelompok dukungan sebaya sangat spesifik (odha dan ohidha)

Soal dan Diskusi

01. Jelaskan apa tujuan lahirnya KDS (kelompok dukungan sebaya)
02. Apakah sesama Odha dapat saling berbagi antiretroviral
03. Bagaimana hubungan Kelompok dukungan sebaya(KDS) dengan Odha

Modul 5.4 Gejala HIV&AIDS, Penularan, Pencegahan Dan Penanganannya

Tujuan : Untuk memberikan pemahaman kepada peserta agar mengetahui informasi, penanganan dan pencegahan Hiv&Aids.

Alat dan bahan:

- Kertas isian form hasil diskusi untuk peserta
- Daftar hadir peserta

Waktu : 60 menit

No	Kegiatan	Waktu
01	Menyapa masyarakat dan pengurus OR	3 menit
02	Melihat daftar kehadiran anggota OR	3 menit
03	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta “ Bagaimana pemahaman anggota OR tentang” gejala hiv/aids,penularan,pencegahan dan penanganannya	5 menit
04	Memberikan lembar materi dan atau pemutaran film kepada masyarakat dampingan tentang “gejala hiv/aids, penularan, pencegahan dan penanganannya”	14 menit
05	Diskusi masyarakat : 4 point	14 menit
06	Presentase kelompok	10 menit
07	Penutup 01.Menyampaikan rangkuman atas presentase kelompok/peserta 02. Meminta kembali kepada peserta untuk memberikan respon atas diskusi tersebut 03.Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keteribatan seluruh peserta.	8 menit
	Total	60 menit

Diskusi

Gejala HIV&AIDS, Penularan, Pencegahan Dan Penanganannya

Pengertian

Gejala HIV dan AIDS secara umum sama seperti influenza walaupun memang ada kekhususan yang tersendiri. Dibawah ini kami terakan gejalanya sebagai berikut :

01. Demam berkepanjangan
02. Batuk berkepanjangan
03. Diare
04. Berat badan turun drastic hamper 10 % setiap bulan
05. Muncul herpes zoster (karo = liliten)
06. Infksi pada mulut (jamur)
07. Timbul getah bening diselangkangan

Cara cara penularan viru HIV :

- a. Melalui hubungan sexual
- b. Jarum suntik yang bergantian
- c. Donor darah /kontak langsung
- d. Ibu ke anak (waktu melahirkan biasa)

Virus HIV tidak akan menular melalui :

01. Bersalaman, berpelukan, berciuman
02. Satu rumah, kamar mandi, toilet bersama
03. Menggunakan piring, gelas, sendok bersama
04. Gigitan nyamuk

Untuk itu sebaiknya didalam keluarga harus dibangun keterbukaan sehingga suami istri berani untuk melakukan test ketika sudah menunjukkan gejala. Bagi keluarga ketika ada pasangan yang sudah terinfeksi sebaiknya menggunakan kondom dalam melakukan hubungan suami istri. Bagi pasangan yang belum mempunyai keturunan tetapi pasangan sudah terinfeksi sebaiknya konsultasi dengan dokter sehingga dapat memperoleh keturunan non reaktif. Tentu hal ini harus benar benar dengan pendampinga dokter. Tentunya untuk pasangan yang sudah terpapar harus konsumsi obat secara teratur. Untuk ibu yang positif juga harus tetap melakukan terapi secara teratur dan termasuk juga untuk keselamatan bayi ketika melahirkan harus melalui Caesar. Hal ini dilakukan supaya tidak ada pertukaran cairan dari ibu ke bayi.

Kesimpulan

01. Virus HIV&AIDS hanya dapat menular melalui kontak langsung (darah dengan darah, ciran dengan cairan)
02. Seseorang dikatakan positif HIV harus melalui hasil laboratorium (bukan berdasarkan gejala secara umum)
03. Test yang dilakukan harus secara rahasia dan ada persetujuan (informed Consent), tanpa paksaan.

Soal dan Diskusi

01. Sebutkan gejala-gejala orang yang terpapar virus HIV
02. Bagaimanakah penanganan terhadap ibu yang positif ketika waktu melahirkan

03. Bagaimana pencegahan yang kita lakukan supaya tidak tertular virus HIV
04. Bagaimana sikap kita untuk mendampingi orang yang positif

BAB 6 Metode dan Strategi Advokasi

Modul 6.1. Advokasi

Pokok Bahasan

Pengenalan tentang metode dan strategi Advokasi

Tujuan

- Peserta memahami Dasar-dasar Advokasi
- Peserta dapat berbagi pengalaman dengan kelompok lain akan kerja-kerja advokasi di daerah asal masing-masing.
- Peserta punya keberanian dan mau melakukan advokasi di komunitasnya

Metode

- Ceramah
- Sharing
- Pleno
- Role Play
- Putar film

ALAT BANTU

- Plano
- Spidol
- Audio visual
- Pengeras suara

Waktu : 1 setengah jam

Proses/Langkah-Langkah Kegiatan :

1. Fasilitator menyampaikan pengantar bahasan. Jelaskan bahwa sesi ini kita akan melihat model-model advokasi yang dilakukan. Fasilitator akan memutarakan sebuah film perjuangan salah satu kelompok. Sehingga dari sini peserta

menemukan gambaran advokasi yang dilakukan dan bagaimana perjuangan masyarakat dalam melakukan pendampingan di komunitasnya.

2. Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok untuk diskusi kelompok. Bahan diskusi kelompok adalah : kerja-kerja advokasi yang dilakukan di daerah/desa peserta dan upaya advokasi yang telah dilakukan.
3. Fasilitator memberi waktu diskusi kelompok selama 20 menit.
4. Fasilitator memandu presentasi hasil kelompok dan Fasilitator memberi kesempatan pada kelompok lain untuk menyampaikan komentar mereka atas presentasi kelompok yang telah selesai presentasi.
5. Fasilitator memberi waktu pada kelompok yang presentasi untuk menanggapi komentar-komentar tersebut.
6. Fasilitator menyampaikan rangkumannya atas presentasi semua kelompok dan menyampaikan paparan tentang dasar-dasar advokasi
7. Fasilitator mengucapkan terima kasih dan berikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta.
8. Fasilitator menutup Sesi.

Bahan bacaan :

Advokasi: Sebuah Definisi

Berbicara advokasi, sebenarnya tidak ada definisi yang baku. Pengertian advokasi selalu berubah-ubah sepanjang waktu tergantung pada keadaan, kekuasaan, dan politik pada suatu kawasan tertentu. Advokasi sendiri dari segi bahasa adalah pembelaan.

Setidaknya ada beberapa pengertian dan penjelasan terkait dengan definisi advokasi, yaitu:

1. Usaha-usaha terorganisir untuk membawa perubahan-perubahan secara sistematis dalam menyikapi suatu kebijakan, regulasi, atau pelaksanaannya (Meuthia Ganier).
2. Advokasi adalah membangun organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat para penguasa bertanggung jawab menyangkut peningkatan keterampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja.
3. Upaya terorganisir maupun aksi yang menggunakan sarana-sarana demokrasi untuk menyusun dan melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata (Institut Advokasi Washington DC).

Dari beberapa definisi di atas, setidaknya advokasi dapat difahami sebagai bentuk upaya melakukan pembelaan rakyat (masyarakat sipil) dengan cara yang sistematis dan terorganisir atas sikap, perilaku, dan kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan dan kenyataan.

Advokasi: Alasan, Tujuan, dan Sasaran

Bagi sebagian orang yang telah berkecimpung dalam dunia advokasi, tentu mereka tidak akan menanyakan kembali mengapa mereka melakukan hal itu. Namun, bagi sebagian lainnya yang belum begitu memahami, atau bahkan belum pernah mengenal, seluk-beluk advokasi, jawaban

atas pertanyaan “Mengapa beradvokasi?” menjadi cukup relevan dan urgen untuk dijawab. Ada banyak sekali alasan mengapa seseorang harus, dan diharuskan, untuk melakukan kerja-kerja advokasi. Secara umum alasan-alasan tersebut antara lain adalah:

- Kita selalu dihadapkan dengan persoalan-persoalan kemanusiaan dan kemiskinan
- Perusakan dan kekejaman kebijakan selalu menghiasi kehidupan kita
- Keserakahan, kebodohan, dan kemunafikan semakin tumbuh subur pada lingkungan kita
- Yang kaya semakin gaya dan yang melarat semakin sekarat

Dari beberapa poin di atas ini kemudian melahirkan kesadaran untuk melakukan perubahan, perlawanan, dan pembelaan atas apa yang dirasakan olehnya. Salah satu bentuk perlawanan dan pembelaan yang “elegan” adalah advokasi.

Tujuan dari kerja-kerja advokasi adalah untuk mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah kondisi yang tidak atau belum ideal sesuai dengan yang diharapkan. Secara lebih spesifik, dalam praksisnya kerja advokasi banyak diarahkan pada sasaran tembak yaitu kebijakan publik yang dibuat oleh para penguasa. Mengapa kebijakan publik? Kebijakan publik merupakan beberapa regulasi yang dibuat berdasarkan kompromi para penguasa (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dengan mewajibkan

warganya untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat. Setiap kebijakan yang akan disahkan untuk menjadi peraturan perlu dan harus dikawal serta diawasi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi warganya. Hal ini dikarenakan pemerintah ataupun penguasa tidak mungkin mewakili secara luas, sementara kekuasaannya cenderung sentralistik dan mereka selalu memainkan peranan dalam proses kebijakan.

Siapa Pelaku Advokasi?

Advokasi dilakukan oleh banyak orang, kelompok, atau organisasi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan (PMII, HMI, GMNI, KAMMI, FMN, LMND, dll)
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau disebut juga organisasi non-pemerintah (NGO)
- Komunitas masyarakat petani, nelayan, miskin kota, Masyarakat adat dan lain-lain
- Organisasi-organisasi masyarakat atau kelompok yang mewakili interest para anggotanya, termasuk organisasi akar rumput
- Organisasi masyarakat keagamaan (NU, Muhammadiyah, MUI, PHDI, PWI, PGI, Walubi, dll)
- Media.
- Komunitas-komunitas basis .

Kerja-kerja Advokasi: Tantangan dan Strategi

Advokasi selamnya menyangkut perubahan yang mengubah beberapa kebijakan, regulasi, dan cara badan-badan perwakilan melakukan kebijakan. Dalam melakukan perubahan kebijakan pun tidak semudah yang kita bayangkan. Ada beberapa lapisan yang harus kita lewati untuk melakukan perubahan tersebut. *Lapisan pertama* mencakup permintaan,

tuntutan, atau desakan perubahan dalam praktik kelembagaan dan program-programnya. Contoh, masyarakat adat, buruh yang menolak UU Cipta kerja. *Lapisan kedua*, mengembangkan kemampuan individu para warga, ormas, dan NGO. Dengan penolakan dan penentangan adanya undang-undang, anggota komunitas belajar bagaimana mengkomunikasikan pesan mereka pada segmentasi yang lebih luas untuk memperkuat basis dukungan kelembagaan mereka. *Lapisan ketiga*, menata kembali masyarakat. Kita mengubah pola pikir dan memberdayakan masyarakat adat tersebut untuk berinisiatif melakukan perjuangan hak-haknya secara mandiri. Advokasi dikatakan berhasil apabila kita mampu membuat komunitas kita lebih berdaya dan mampu meneriakkan aspirasinya sendiri. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk memetakan dan mengawal jalannya sebuah kebijakan sebelum disahkan menjadi hukum formal, yaitu:

- Mengerti dan memahami isi dari kebijakan beserta konteksnya, yaitu dengan memeriksa kebijakan apa saja tujuan dari lahirnya kebijakan tersebut
- Pelajari beberapa konsekuensi dari kebijakan tersebut. Siapa saja yang akan mendapat manfaat dari kebijakan tersebut
- Siapa yang akan dipengaruhi baik itu sifatnya merugikan ataupun menguntungkan
- Siapa aktor-aktor utama, siapa yang mendorong dan apa kepentingan serta posisi mereka
- Tentukan jaringan formal maupun informal melalui mana kebijakan sedang diproses. Jaringan formal bisa termasuk institusi-institusi seperti komite legislatif dan forum public hearing
- Jaringan informal melalui komunikasi interpersonal dari individu-individu yang terlibat dalam proses pembentukan kebijakan
- Mencari tahu apa motivasi para aktor utama dan juga jaringan yang ada dalam mendukung kebijakan yang telah dibuat.

Perlu kita pahami bahwa advokasi tidak terjadi seketika. Advokasi butuh perencanaan yang matang. Agar advokasi yang dilakukan dapat terwujud secara maksimal, maka kita perlu menggunakan beberapa strategi.

Strategi dalam melakukan advokasi:

- Membangun jaringan di antara organisasi-organisasi akar rumput (grassroots) seperti federasi, perserikatan, dan organisasi pengayom lainnya
- Mempererat komunikasi dan kerjasama dengan para pejabat dan beberapa partai politik yang berorientasi reformasi pada pemerintahan
- Melakukan lobi-lobi antar instansi, pejabat, organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan (NU dan Muhammadiyah)
- Melakukan kampanye dan kerja-kerja media sebagai ajang publikasi
- Melewati aksi-aksi peradilan (litigasi, class action dll)
- Menerjunkan massa untuk melakukan demonstrasi

Manajemen Aksi

Menerjunkan massa untuk melakukan aksi ataupun demonstrasi adalah merupakan strategi akhir dalam mengadvokasi setiap kebijakan yang telah disahkan ataupun merugikan banyak kalangan. Berikut beberapa aturan main ataupun perencanaan dalam melakukan aksi ataupun melakukan demonstrasi. Sebelum menentukan apakah kita akan melakukan aksi, kita harus menjawab dulu poin-poin pertanyaan berikut:

- Pemetaan isu ataupun wacana apa yang akan kita gaungkan?

- Apa yang kita inginkan atas isu yang telah kita gaungkan; menolak atau mendukung?
- Apa persoalannya kemudian kita berinisiatif untuk melakukan aksi?
- Bagaimana kita hendak mengaksesnya?
- Apa sasaran dan tujuan kita (siapa yang membuatnya)?
- Apa yang sedang ditargetkan perundang-undangan ataupun peraturan administratif?

Modul 6.2. Strategi Advokasi Dalam Politik

Pokok Bahasan

Pengenalan tentang Jenis strategi Advokasi

Tujuan

- Peserta memahami Jenis-jenis strategi Advokasi
- Peserta dapat berbagi pengalaman dengan peserta lain akan kerja-kerja advokasi di daerah asal masing-masing.
- Peserta memahami jenis-jenis strategi advokasi melakukan advokasi di komunitasnya

Metode

- Ceramah
- Sharing
- Pleno
- Role Play
- Putar film

ALAT BANTU

- Plano
- Spidol
- Audio visual
- Pengeras suara

Waktu : 1 jam setengah

Proses/Langkah-Langkah Kegiatan :

9. Fasilitator menyampaikan pengantar bahasan. Jelaskan bahwa sesi ini kita akan melihat model-model strategi advokasi yang dilakukan. Fasilitator akan menjelaskan atau memutarakan sebuah film perjuangan salah satu kelompok. Sehingga dari sini peserta menemukan gambaran strategi advokasi yang

dilakukan dan bagaimana strategi masyarakat dalam melakukan perjuangan di komunitasnya.

10. Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok untuk diskusi kelompok. Bahan diskusi kelompok adalah : Beberapa jenis strategi advokasi yang dilakukan di daerah/desa peserta dan upaya yang telah dilakukan.
11. Fasilitator memberi waktu diskusi kelompok selama 20 menit.
12. Fasilitator memandu presentasi hasil kelompok dan Fasilitator memberi kesempatan pada kelompok lain untuk menyampaikan komentar mereka atas presentasi kelompok yang telah selesai presentasi.
13. Fasilitator memberi waktu pada kelompok yang presentasi untuk menanggapi komentar-komentar tersebut.
14. Fasilitator menyampaikan rangkumannya atas presentasi semua kelompok dan menyampaikan paparan tentang jenis-jenis strategi advokasi.
15. Fasilitator mengucapkan terima kasih dan berikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta.
16. Fasilitator menutup Sesi/pendidikan

Bacaan: STRATEGI ADVOKASI DALAM POLITIK

Pengertian

Pengertian advokasi (advocacy) adalah suatu bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, memberi dukungan, atau rekomendasi berupa dukungan aktif. Advokasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan melakukan berbagai macam pola komunikasi yang persuasif.



Sheila Espine Vilaluz

Menurut Sheila Espine Vilaluz, Advokasi adalah aksi strategis dan terpadu yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memberi masukan isu ataupun masalah ke dalam rancangan dan rencana kebijakan. Serta advokasi dapat berarti membangun suatu basis pendukung terhadap kebijakan publik yang diambil guna menyelesaikan persoalan yang ada.

Kaminski dan Walmsley (1995)

Menurut Kaminski dan Walmsley, Advokasi adalah suatu pekerjaan yang memberikan petunjuk atas keunggulan pekerjaan sosial dibandingkan profesi yang lain.

Menurut John Hopkins, Advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif dengan menggunakan informasi yang akurat dan tepat.

Menurut Mansour Faqih, Alm., dkk, Advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (incremental).

STRATEGI ADVOKASI

Tujuan advokasi yang baik dan terencana sering tidak tercapai atau tidak memenuhi harapan karena salah dalam memilih strategi dalam mencapai tujuan.

STRATEGI ADVOKASI (Loue, 2006):

1. Advokasi melalui media
2. Advokasi melalui pengadilan
3. Advokasi menggunakan jejaring
4. Advokasi melalui legislasi, perundangan dan peraturan

STRATEGI ADVOKASI (Martuti dkk, 2010):

Berdasarkan kekuatan apa yg ditonjolkan (fisik atau non fisik)	Berdasar pendekatan pada Pengambil Keputusan	Berdasar aktifitas Pekerja Advokasi
Advokasi dng kekerasan	Strategi konfrontatif	Advokasi yang PROAKTIF (proaktif mempengaruhi kebijakan)
Advokasi non violence	Strategi kooperatif	Advokasi yang REAKTIF (mempengaruhi kebijakan ses kebijakan diundangkan/ ditetapkan secara hukum)

ADVOKASI PROAKTIF

1. Lobby (lobi)
2. Public hearing (dengar pendapat)
3. Kampanye

Lobby atau Lobi (Oxford Disc):

Kegiatan utk mendorong dan meloloskan suatu tujuan dng mempengaruhi pegawai/ pejabat pemerintah atau anggota dewan sebelum kebijakan diputuskan.

6 langkah lobi:

1. Bangun hubungan dan jadi sumber informasi
2. Prioritaskan isu, tidak minta terlalu banyak
3. Datang dng tawaran solusi berdasar riset
4. Kumpulkan informasi secara intelijen
5. Siapkan kontak, materi brifing dan argumen pendukung/ bantahan
6. Lakukan kontak personal dan kelembagaan

Kiat lobi:

1. Bawa alat lobi berupa informasi terkait isu (latar belakang, data dan fakta, telaah ketimpangan kebijakan dan arah yg diinginkan)
2. Fact sheet, Booklet atau Position paper
3. Datang dengan konsep rumusan solusi masalah terkait kebijakan yg matang dan jelas

5 PRINSIP LOBI:

1. Jangan emosional atau arogan
2. Jangan menguasai forum dialog dan jangan biarkan lawan kuasai forum (seimbang)
3. Jangan memaksakan kehendak dan merasa paling Benar
4. Jangan mengemis, posisikan sebagai pelobi yg punya posisi tawar
5. Jangan datang lobi tanpa bawa konsep dan alat lobi

HEARING (Dengar Pendapat- RDP):

1. Hearing pd pengambil keputusan (biasanya sdh termasuk bagian dari lobi)
2. Hearing kepada publik (public hearing) dng tujuan mensosialisasikan gagasan dan mencari masukan dan menyerap aspirasi masyarakat sekitar isu tsb. Dapat dilakukan dengan diskusi, debat terbuka atau seminar, sarasehan dsb

KAMPANYE

1. Kegiatan utk sosialisasikan ide, wacana, pandangan thd suatu kebijakan dg tujuan mendapat dukungan publik.
2. Proses terorganisir utk membentuk pendapat publik"

ALAT KAMPANYE:

1. Media massa
2. Media cetak: leaflet, booklet, poster, koran, majalah, siaran pers, artikel, feature
3. Media elektronik: radio, tv, dialog interaktif
4. Media moderen: FB, Twitter

ADVOKASI REAKTIF:

1. Demonstrasi
2. Legal standing (tuntutan hukum)
3. Class Action (gugatan perwakilan)
4. Boikot
5. Revolusi

DEMONSTRASI (1) Sebelum demo:

1. Apa tujuan demo? Siapa yg terlibat, berapa jumlahnya, adakah kemampuan utk kendalikan agar tidak anarkis, apa dampak yg ditimbulkan?
2. Siapa pemimpin demo? jika ada penangkapan atau pelanggaran hukum siapa yg bertanggungjawab? Siapa yg akan membela secara hukum (pengacara), "ijin" demo.

DEMONSTRASI (2)

1. Menjadi pressure dan menarik pers utk publikasi isu
2. Beaya relatif mahal
3. Beaya sosial tinggi bila tak terkendali
4. Pertimbangkan baik utk Demo.

LEGAL STANDING

Tuntutan hukum di pengadilan oleh individu atau kelompok/organisasi yg bertindak utk mewakili kepentingan publik tanpa harus didasarkan pd kepentingan hukum tuntutan, tanpa penderita atau kuasa hukum yg menderita.

CLASS ACTION

1. Hak kelompok kecil masy untuk bertindak mewakili masy dlm jmlh besar yg dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yg ditimbulkan
2. Biasanya terkait tuntutan perdata terkait ganti rugi.

BOIKOT

1. Melakukan pembangkangan atau penolakan melaksanakan kebijakan pemerintah
2. Bentuk konfrontasi tanpa kekerasan
3. Contoh: boikot pajak kendaraan bermotor, biasanya diawali deklarasi lalu diikuti kampanye.

REVOLUSI (1)

Sebuah perubahan cepat, fundamental dan domestik dlm nilai nilai yg dominan dr suatu masy dlm lembg politik, struktur sosial, kepemimpinan dari aktifitas pemerintah dan politik (Huntington dan Tilly (1978)

REVOLUSI (2)

1. Kegiatan utk merubah sistem politik yg ada secara cepat dan radikal
2. Melalui collective action baik cara damai maupun kekerasan
3. Merupakan pilihan strategi terakhir bila cara lain tidak berhasil.

